

**TATA KELOLA PARIWISATA KEPULAUAN BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

Oleh:

EKO FIRDAUS
NPM: 1603100078

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

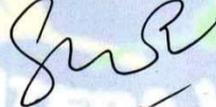
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipergunakan dalam ujian skripsi, oleh :

Nama Lengkap : EKO FIRDAUS
N.P.M : 1603100078
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil

Medan, 08 Agustus 2021

Dosen Pembimbing



Dr. SITI HAJAR , S.Sos., M.SP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Lengkap : EKO FIRDAUS
N P M : 1603100078
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Jum'at, 15 Oktober 2021
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP (.....)
PENGUJI II : Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si (.....)
PENGUJI III : Dr. Siti Hajar, S.Sos, M.SP (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Sekretaris,

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Eko Firdaus NPM : 1603100078 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memasukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 23 November 2021

Yang Menyatakan



Eko Firdaus

ABSTRAK

TATA KELOLA PARIWISATA KEPULAUAN BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL

Oleh:

EKO FIRDAUS

NPM: 1603100078

Konsep Administrasi Publik, dalam pelaksanaan sistem pemerintahan tidak terlepas dari pentingnya tata kelola pemerintahan di setiap aspek meliputi, ekonomi, politik, sosial, budaya, pariwisata dan lain-lain. Tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan disebut dengan *governance*. *Governance* merupakan sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik, dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah dan aktor swasta. Maka pentingnya tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintah terutama di sektor pariwisata. Hal ini terkait dengan kesinambungan pembangunan pariwisata untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan kepariwisataan akan berdampak positif apabila pada pengelolaan dan tata kelolanya dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, industri pariwisata dan masyarakat. Pencapaian dari tujuan pembangunan kepariwisataan tersebut akan tercapai apabila proses yang dilakukan melalui praktik praktik tata kelola pariwisata yang baik atau yang disebut dengan istilah *Good Tourism Governance* (GTG) sebagai keterpaduan antara prinsip-prinsip *good governance* dan industri pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari para narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil sudah menerapkan prinsip *Good Tourism Governance*, namun penerapannya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan ketercapaian masing-masing prinsip dalam *Good Tourism Governance* belum terpenuhi secara keseluruhan. Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak diukur berdasarkan prinsip *Good Tourism Governance* meliputi, partisipasi masyarakat terkait, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, kemitraan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, mengakomodasikan aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, akuntabilitas lingkungan dan pelatihan pada masyarakat terkait yang masing-masing dari prinsip tersebut belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan beberapa faktor yang menghambat penerapannya.

Kata kunci: Tata Kelola, Pariwisata, Destinasi Wisata, Good Tourism Governance (GTG).

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin atas Rasa Syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena berkat Karunia-Nya juga maka skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil”, yang merupakan syarat akhir untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat teriring salam tidak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan umat islam, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang terang (ilmu pengetahuan) dengan akhlak yang mulia.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril, materil, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat, dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda penulis Iswandi dan Ibunda tercinta Ermita serta adik-adik Mahfuja, Bayu Suwandi dan Marwah Adha Eryulijah yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Siti Hajar, S.Sos., MSP selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
6. Dosen–dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan biro yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi penulis.
8. Bapak Edy Hartono, BA selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

10. Kepada Uan/Mande, Pak Uni/Mak Uni, Bapak/Ibu, Pak Uti/Teti, Paman/Bibi, Pak Itam/Mak Iam dan Pak Bungsu/Bungsu serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Kepada sahabat terbaik Tince, S.Si, Abrar, SE, Tata, S.Or, Kuntet, S.Pd, Asnaw, S.Sos, Saralek, S.IP, Rifqi, Fauzan S.St. Par, Miranda, Dede, S.Sos dan Dedit Lubis, Hasminullah, Baem, Rizki, Ari, Dilla, Lita, Nining, Jeni, Febi dan Seluruh teman selama perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Kepada seluruh Pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Aceh Singkil dan Seluruh Anggota Tunas Muda Table Tennis Club Singkil yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Juli 2021

Yang Menyatakan

DAFTAR ISI

Table of Contents

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	8
URAIAN TEORITIS	8
2.1 Administrasi Publik	8
2.2 Governance	9
2.3 Pariwisata	10
2.4 Kebijakan Pariwisata	17
2.5 Tata Kelola Kepariwisata yang Baik (Good Tourism Governance)	Error!
Bookmark not defined.	
BAB III	25
METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Kerangka Konsep	26
3.3 Defenisi Konsep	27
3.4 Kategorisasi	28
3.5 Narasumber	28

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7 Teknik Analisis Data.....	30
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	31
BAB IV.....	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Pembahasan.....	68
BAB V.....	78
PENUTUP.....	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep	26
Gambar 3. 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil	47

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2.2.1	72
Tabel 4.2.2.2	73
Tabel 4.2.4.1	77

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Pedoman Wawancara
- Lampiran III : SK-I Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-III Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-IV Undangan Seminar Proposal
- Lampiran VII : SK-V Berita Acara Bimbingan
- Lampiran VIII : SK-VI Permohonan Ujian Skripsi
- Lampiran IX : SK-VII Surat Pernyataan Sidang Skripsi
- Lampiran X : SK-VIII Undangan Ujian Skripsi
- Lampiran XI : Surat Izin Riset
- Lampiran XII : Surat Balasan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi Publik, menjadi salah satu ilmu pengetahuan yang mencakup keseluruhan praktik dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan untuk merumuskan, mengimplementasikan (melaksanakan) berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pencapaian tujuan negara secara efisien dan berkeadilan sosial demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Eksistensi pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan istilah *good governance* merupakan salah satu konsep Administrasi Publik yang digunakan dalam dekade sekarang secara beraturan dalam mengelola berbagai kepentingan dan urusan publik melalui berbagai keputusan publik dengan banyak menaruh keterlibatan diluar dari aktor pemerintahan.

Konsep Administari Publik, dalam pelaksanaan sistem pemerintahan tidak terlepas dari pentingnya tata kelola pemerintahan di setiap aspek meliputi, ekonomi, politik, sosial, budaya, pariwisata dan lain-lain. Tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan disebut dengan *governance*.

Chhotray dan Stoker (Rahayu dan Juwono, 2019: 193) berpendapat bahwa *governance* berisi tentang aturan-aturan pengambilan keputusan kolektif di lingkungan dengan keberadaan sejumlah aktor atau organisasi dan ketidakadaan sistem kontrol formal yang dapat menentukan persyaratan hubungan antara aktor organisasi ini. Kemudian Chema (Keban, 2008: 38) berpendat bahwa *governance* merupakan sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan dimana urusan-urusan

ekonomi, sosial, politik, dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah dan aktor swasta. Maka pentingnya tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintah terutama di sektor pariwisata. Hal ini terkait dengan kesinambungan pembangunan pariwisata untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pembangunan pariwisata telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dengan pertimbangan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, yang pada BAB II pasal 4 menjelaskan bahwa tujuan kepariwisataan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan tertulis empat komponen utama dalam pembangunan kepariwisataan nasional yang salah satunya adalah komponen destinasi pariwisata yang bertujuan untuk menjadikan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat yang

berdiri diatas enam pilar yaitu atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas, masyarakat dan investasi.

Konsep pariwisata tidak terlepas dari adanya perjalanan yang dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok dari suatu tempat yang bukan merupakan tempat tinggalnya ke tempat lain yang sifatnya sementara dan bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dan berekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara, mereka tidak mendapatkan penghasilan, tetapi sebagai konsumen. Tempat yang memiliki daya tarik wisata yang menjadi kunjungan wisatawan lebih dikenal dengan sebutan destinasi pariwisata.

Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu daerah di Provinsi Aceh yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata. Hal ini mengingat banyaknya potensi pariwisata baik alam, budaya, maupun minat khusus. Sebagai salah satu potensi pariwisata yang dapat dikembangkan adalah Kepulauan Banyak dengan keindahan pantai, keindahan ekosistem terumbu karang, maupun ekosistem pulau-pulau kecil yang sangat kaya. Hal inilah yang menjadikan Kepulauan Banyak masuk dalam Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Nias-Simeulue dan sekitarnya yakni berada pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Pulau Simeulue dan Pulau Banyak.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) Kabupaten Aceh Singkil yang salah satunya bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Aceh Singkil sebagai destinasi wisata yang menarik, aman, nyaman, relatif mudah

dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat.

Pembangunan kepariwisataan akan berdampak positif apabila pada pengelolaan dan tata kelolanya dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, industri pariwisata dan masyarakat. Pencapaian dari tujuan pembangunan kepariwisataan tersebut akan tercapai apabila proses yang dilakukan melalui praktik praktik tata kelola pariwisata yang baik atau yang disebut dengan istilah *Good Tourism Governance* (GTG) sebagai keterpaduan antara prinsip-prinsip *good governance* dan industri pariwisata (Sunaryo, 2013).

Proses penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik, sangat dibutuhkan pada sektor publik adanya perubahan baik dalam cara berfikir maupun bertindak, terutama dengan meninggalkan paradigma lama yang berupa suatu bangunan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dan berwawasan lokus tunggal yang berupa birokrasi pemerintahan (*government bureaucracy*) untuk menuju kepada paradigma baru yang berupa model penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik dan belokus jamak (Sunaryo, 2013: 81). Lebih lanjut Sunaryo (2013: 86) menjelaskan bahwa secara logik-konseptual, melalui reformasi birokrasi diharapkan akan ada suatu *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur dalam tata kelola kepariwisataan dari pusat sampai daerah dimasa yang akan datang. Sebagai indikator *output* antara lain: bebas KKN, pelayanan yang prima, peningkatan investasi dan tidak ada lagi keluhan masyarakat dan wisatawan terhadap pelayanan di sektor pariwisata. Sedangkan indikator *outcome* antara lain adalah kesejahteraan rakyat khususnya yang terkait dengan

kepariwisataan yang antara lain ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta aparatur kepariwisataan yang profesional dan bermoral.

Pertanggung jawaban dari tujuan kebijakan pembangunan kepariwisataan Aceh Singkil menjadi permasalahan yang harus diperhatikan secara serius. Mengingat banyak hal seperti daya tarik wisata dan objek wisata masih belum baik, penyediaan fasilitas umum yang belum maksimal, pembangunan prasarana yang tidak merata menjadi pekerjaan penting dalam pertanggung jawaban dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka perumusan masalah peneliti adalah **“Bagaimana Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil”**.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Secara Akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu

Administrasi Publik terkhusus berkaitan dengan Tata Kelola Pariwisata, referensi bagi penulis yang ingin meneliti hal yang sama.

- b. Secara Teoritis, untuk menambah wawasan atau pengetahuan penulis dan nantinya dapat mengaplikasikan teori-teori yang sudah diperoleh dalam proses perkuliahan.
- c. Bagi masyarakat dan pemerintah, dapat mengetahui bagaimana Tata Kelola Pariwisata yang baik.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan menguraikan tentang Administari Publik, Tata Kelola (*Governance*), Kepariwisataan, Tata Kelola Kepariwisataan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini Berisikan persiapan dan pelaksanaan peneltitian yang menguraikan tentang metode penelitian, jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil pengamatan dan penelitian dari narasumber.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.4 Administrasi Publik

Lokus dari Ilmu Administrasi Publik tidak hanya terkait dengan lembaga-lembaga pemerintah tetapi juga dengan institusi lain yang terkait dengan upaya memenuhi kepentingan publik seperti organisasi non pemerintahan, militer, kelompok kepentingan, partai politik, media massa dan masyarakat sipil lainnya. Demikian fokusnya tidak lagi sekedar mengimplementasikan kebijakan pemerintah, tetapi mencakup pembuatan (formulasi) kebijakan negara, pelaksanaan kebijakan dan penataan hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil (Syafri, 2012:18).

Kedudukan administrasi publik dalam pemerintahan yang baik hanya terpaku pada aturan legalistis yang kaku, tetapi juga berorientasi dinamis untuk melaksanakan aturan legal tersebut. Sebagian besar persoalan administrasi publik bersumber dari persoalan masyarakat. Administrasi publik adalah suatu sistem yang menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, Gerald Caiden (Thoha, 2014: 40) menandakan bahwa disiplin administrasi publik ini pada hakikatnya merupakan suatu disiplin yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*) dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat (*public business*).

Denhardt dan Denhardt (Rahayu dan Juwono, 2019: 24) menyebutkan bahwa dalam administrasi publik, pencarian masyarakat tercermin dalam pandangan bahwa peran pemerintah khususnya pemerintah daerah memang untuk membantu

menciptakan dan mendukung masyarakat. Pemerintah juga mengakomodasi peran masyarakat dengan membangun koneksi antara warga negara dengan komunitasnya dalam pemerintahan yang demokratis. Disamping itu administrasi publik harus meninggalkan pendekatan pencapaian efisiensi mekanis dimana manusia diperlakukan seperti halnya mesin produksi.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah rangkaian proses kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengedepankan pada demokratisasi dalam menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk pencapaian tujuan negara.

2.2 Governance

Pada tingkat yang paling dasar, tata kelola mencakup pada pengelolaan jalannya peristiwa dalam sistem sosial, baik sistem yang disusun dalam kerangka organisasi, sektoral atau yang lebih luas. Dalam hal ini, tata kelola adalah sistem mencakup struktur, interaksi internal dan eksternal, serta cara pengambilan keputusan dan perilaku-perilaku lain yang relevan. Chhotray dan Stoker (Rahayu dan Juwono, 2019: 193) merumuskan definisi tata kelola atau *governance* berisi tentang aturan-aturan pengambilan keputusan kolektif dilingkungan dengan keberadaan sejumlah aktor atau organisasi dan ketidakadaan sistem kontrol formal yang dapat menentukan persyaratan hubungan antara aktor organisasi ini.

United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan istilah *governance* sebagai suatu *exercise* dari kewenangan politik, ekonomi, dan

administrasi untuk menata, mengatur, dan mengelola masalah-masalah sosialnya (Thoha, 2014: 67).

Stoker (Kurniawan, 2007) menjelaskan bahwa konsep *governance* merujuk pada pengembangan dari gaya memerintah dimana batas-batas antara dan diantara sektor publik dan sektor privat menjadi kabur. Pengaburan batas-batas ini sejalan dengan kebutuhan negara modern untuk lebih melibatkan mekanisme politik dan untuk terlibat sehingga memberikan kesempatan bagi adanya mobilisasi baik pembangunan jejaring antara pemerintah dan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting bagi keberlanjutan sebuah legitimasi kebijakan.

Istilah *governance* telah lama kita kenal, yaitu merujuk pada hubungan antara pemerintah/negara dengan warganya sehingga memungkinkan berbagai kebijakan dan program dapat dirumuskan, diimplementasikan dan dievaluasi. Kaufaman, Kraay dan Masturazzi (Syafri, 2012: 180) mengatakan “*Governance is the relationship between government and citizens that enable public policies and programs to be formulated, implemented, and evaluated. In the boarder context, it refers to the rules, institutions, and networks that determine how country or an organization functions*” (*Governance* adalah hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya yang memungkinkan berbagai kebijakan publik dan program dirumuskan, dilaksanakan dan dievaluasi).

2.3 Pariwisata

2.3.1 Definisi Pariwisata

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan

untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan guna pertamasyaan dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beranekaragam (Yoeti, 1982: 118-119).

Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengerahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olahraga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha lainnya (Suwanto, 2004: 3-4).

Mengingat konsep kepariwisataan pada umumnya dikembangkan di dunia barat, maka perlu diperhatikan bagaimana istilah tersebut didefinisikan. Richard R. Goeldner dan J.R Brent Ritchie (Antariksa, 2016: 16-17) berpendapat bahwa *“Tourism the processes, activities, dan outcomes arising from the relationship and the interactions among tourist, tourism suppliers, host government, host communities, and surrounding environments that are involved in the attracting and hosting of visitors”*. Dengan demikian, *tourism* diartikan sebagai proses, aktivitas dan segala hasil yang muncul dari hubungan antar pemangku kepentingan di bidang tersebut, termasuk wisatawan itu sendiri.

Pariwisata disatu sisi adalah proses perilaku orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya dan kembali ke tempat semula

untuk tujuan rekreasi pada kurun waktu tertentu (yang biasanya tidak lebih dari setahun). Sementara disisi lainnya, jika dilihat dari *supply* dan *demand*, pariwisata adalah suatu kegiatan yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang dapat memberikan dampak positif dan negatif dari suatu destinasi (negara) yang diminati wisatawan. Dan kegiatan wisata tersebut hanya bisa tercipta jika didukung oleh kebijakan suatu negara dalam menyediakan segala aspek yang berkaitan dengan atraksi, aksesibilitas dan amenitas termasuk faktor keamanan (Judisseno, 2017: 11).

2.3.2 Prinsip-prinsip Pariwisata

Wawasan pembangunan kepariwisataan secara berlanjut pada prinsipnya merekomendasikan untuk menakar keberhasilan kinerja pembangunan kepariwisataan harus paling tidak melalui 4 (empat) parameter utama yang telah dikemukakan oleh Sunaryo (2013: 45-46) yaitu:

1. Mampu berlanjut secara lingkungan (*environmentally sustainable*); Prinsip ini menekankan bahwa proses pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (alam maupun sosial, ekonomi dan budaya), dan seminimal mungkin menghindarkan dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi yang ada.
2. Dapat diterima oleh lingkungan sosial dan budaya setempat (*socially and culturally acceptable*); Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan kepariwisataan disuatu destinasi haruslah dapat diterima secara sosial dan budaya masyarakat setempat. Oleh karenanya, upaya-upaya pembangunan

yang dilaksanakan harus mampu memperhatikan, mengapresiasi nilai-nilai sosial budaya, adat-istiadat dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat yang ada di destinasi.

3. Layak dan menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*); Menekankan bahwa setiap rencana dan program kegiatan pembangunan kepariwisataan yang akan diselenggarakan harus layak secara ekonomi dan menguntungkan baik negara, daerah maupun masyarakat setempat.
4. Memanfaatkan teknologi yang layak/pantas diterapkan di wilayah lingkungan tersebut (*technologically appropriate*); Memberikan penekanan bahwa dalam proses pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan, jenis teknologi yang digunakan haruslah sesuai dengan lingkungan, efisien dan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya lokal dan dapat diadopsi oleh masyarakat setempat secara mudah serta harus berorientasi jangka panjang.

2.3.3 Karakteristik Pariwisata

Karakteristik destinasi esensinya bersifat lokal sehingga berbagai aktivitas yang terjadi secara geografis dan geofisik dilakukan di tempat daya tarik (lokal). Bukan di tempat asal wisatawan. Oleh karena itu, mengelola nilai lokal secara lebih optimal akan mengaruhi kapasitas, perkembangan, model bisnis pariwisata, dan keberlanjutan destinasi pariwisata, selanjutnya akan mengakibatkan daya tarik bagi *destination spill over* dan *multiplier effect* di destinasi (Teguh, 2015:3).

Tindak lanjut dalam kegiatan pariwisata dalam mengembangkan kawasan-kawasan wisata secara bertahap melalui urutan prioritas pengembangan berdasarkan potensi yang dimiliki setiap kawasan, agar tercapai suatu keterpaduan pengembangan yang menyeluruh. Dengan demikian, WTO (2001) membagi beberapa jenis pariwisata, yaitu:

1. *Cultural Tourism*, merupakan jenis pariwisata yang memiliki daya tarik utama pada kebudayaan masyarakat setempat ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran riset, untuk mempelajari adat-istiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat negara lain, untuk mengunjungi monument bersejarah, peninggalan peradaban masa lalu dan sebaliknya penemuan-penemuan besar masa kini, pusat-pusat kesenian, pusat-pusat keagamaan, atau juga ikut serta dalam festival-festival seni music, teater, tariak rakyat dan lain-lain.
2. *Rural Tourism*, merupakan jenis pariwisata yang menjual suasana pedesaan dan keadaan sosial ekonomi masyarakatnya yang biasanya memiliki keunikan.
3. *Sun-beach Tourism*, merupakan jenis pariwisata yang menjual keindahan pantai sebagai daya tarik utama.
4. *Business Travel* tempat yang menjadi daerah tujuan pariwisata, jenis ini biasanya memiliki fasilitas perdagangan yang lengkap, dengan para pengunjungnya biasanya terkait dengan motif *business tourism*.
5. *Sport Tourism*, jenis ini dibagi dalam beberapa kategori:

- a. *Big Sport Events*, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti olimpiade, kejuaraan olahraga dunia menarik perhatian tidak hanya pada olahragawannya sendiri, tetapi juga ribuan penontonya.
 - b. *Sporting Tourism of the Practioners*, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih, seperti pendakian gunung, berkuda, berburu, memancing. Negara yang memiliki banyak fasilitas olahraga seperti ini tentu dapat menarik sejumlah besar penggemar wisata seperti ini.
 - c. *Fitness-wellness and Health Tourism*, daya tarik utama yang dicari oleh para pengunjung jenis pariwisata ini adalah berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan olahraga maupun pemeliharaan kesehatan, contohnya *fitness center* dan *health spa*.
6. *Nature Tourims*, merupakan pariwisata yang memiliki sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam dan unik sebagai faktor daya tarik utama bagi pengunjungnya. *Nature Tourism* terbagi atas 2 jenis pariwisata, yaitu:
- a. *Adventure Tourism*, merupakan pariwisata yang memiliki sumber daya alam yang relatif belum tersentuh/rusak oleh manusia dengan menawarkan berbagai kegiatan pariwisata yang bersifat tantangan atau petualangan.
 - b. *Ecotourism*, merupakan pariwisata yang memiliki interaksi dengan alam yang juga digabungkan dengan keinginan untuk meminimalkan dampak negatif pariwisata.

Menanggapi jenis-jenis pariwisata yang dijelaskan di atas, maka Inskeep (1991) bahwa pengembangan pariwisata yang efektif dapat dicapai dengan menggunakan konsep-konsep pengembangan secara umum tetapi disesuaikan dengan karakteristik kepariwisataan. Dengan demikian, pariwisata juga dalam pengembangan daya tarik wisatanya juga dapat dikelompokkan berdasarkan wilayahnya bertujuan: 1) memunculkan kekayaan/keragaman produk wisata yang dimiliki agar dapat ditawarkan kepada segmen pasar wisatawan yang lebih beragam; 2) secara kolektif membentuk atau memunculkan ciri khas yang mengedepankan atau mengangkat jati diri wilayah tersebut; 3) meningkatkan daya saing produk wisata lokal, baik secara nasional atau bahkan internasional; 4) menciptakan keterpaduan pengembangan pariwisata antar kawasan; 5) efisiensi pelaksanaan program pembangunan pariwisata, baik perencanaan, pengelolaan, maupun pemasaran dan promosi. Sedangkan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan pengelompokan wilayah tersebut adalah:

1. Faktor geografis, kedekatan geografis merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pengelompokan kawasan pariwisata. Perencanaan dan pengembangan pariwisata akan lebih mudah dilakukan jika jarak dan fisik antar kawasan dekat. Kedekatan geografis juga akan mempermudah koordinasi pihak yang terkait dalam pengembangan kawasan.
2. Faktor aksesibilitas, faktor kedekatan geografis harus ditunjang dengan aksesibilitas yang baik. Walaupun letak objek dan daya tarik wisata berdekatan, bila tidak ditunjang oleh aksesibilitasnya lebih baik. Faktor

kemudahan aksesibilitas ini diperlukan agar perkembangan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata lainnya yang berada dalam satu kawasan pengembangan pariwisata.

3. Faktor pengikat, merupakan tanda fisik atau non fisik yang berfungsi sebagai pengikat pengikat beberapa daerah tujuan wisata. Tanda fisik dapat berupa bentang alam, jalur jalan batas wilayah, sedangkan non fisik dapat berupa pengaruh suatu budaya tertentu. Daerah tujuan wisata yang berada dalam satu faktor pengikat yang sama memiliki kecenderungan karakteristik fisik dan non fisik wilayah yang sama sehingga mempermudah perumusan rencana dan program yang akan dilakukan pada kawasan pengembangan pariwisata tersebut.
4. Karakteristik produk wisata unggulan, yang sama dan atau saling melengkapi. Suatu kawasan pariwisata seharusnya memiliki produk wisata unggulan yang dapat dijadikan tema pengembangan sehingga dapat memunculkan identitas kawasan.
5. Keragaman produk wisata unggulan antar kawasan, kawasan pariwisata yang terbentuk harus dapat menunjukkan keragaman dan keunikan satu sama lain sehingga kekayaan pariwisata lokal dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai daya tarik wisata utama secara regional.

2.4 Kebijakan Pariwisata

Sejarah perkembangan kebijakan pariwisata dunia dimulai seiring perkembangan industri pariwisata itu sendiri. Pada era 1980-an terjadi perubahan paradigma dari pariwisata massal (*mass tourists*) ke pariwisata alternative

(*alternative tourism*) yang mana industri pariwisata telah memasuki era globalisasi, supersegmentasi, teknologi baru dan meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial dan ekologi. Persaingan menjadi fungsi utama dalam pariwisata alternatif dibanding kuantitas yang menjadi “modus operandi” pariwisata massal. Sebagaimana yang telah dijelaskan Fayos-Sola (Pittana dan Diarta, 2020: 107-108) bahwa perkembangan kebijakan pariwisata dunia telah mengalami 3 (tiga) tahapan generasi, yaitu sebagai berikut:

1. Paradigma kebijakan pariwisata massal; Generasi ini didasarkan pada target pencapaian jumlah wisatawan sebesar-besarnya, pencapaian pendapatan pariwisata yang sebesar-besarnya dan lapangan kerja di sektor pariwisata.
2. Paradigma kebijakan pariwisata untuk kesejahteraan sosial; Periode ini dimulai sekitar tahun 1970-an ketika krisis ekonomi melanda dunia, termasuk pertumbuhan ekonomi berfluktuasi serta masa resesi panjang. Dalam periode ini dampak sosial, ekonomi, dan ekologi akibat keberadaan pariwisata sudah mulai disadari sementara fokus pada pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwisata mulai redefinisi. Peran pariwisata mulai digeser ke pencapaian kesejahteraan sosial, bukan lagi pada pertumbuhan ekonomi semata.
3. Paradigma kebijakan pariwisata terpadu (holistik); Pada periode ini mulai disadari bahwa sisi persaingan memegang peran menentukan dalam industri pariwisata. Kemitraan antara pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat diberi penekanan lebih sehingga mendorong

hubungan simbiotik antar sektor. Diskusi kebijakan pembangunan pariwisata bergeser dari sisi konvensional seperti pemasaran, promosi, pajak, insentif, akomodasi dan transportasi menuju isu yang lebih holistik yang berkaitan dengan lingkungan, dampak sosial, pemerataan (siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana), serta regulasi pariwisata internasional yang menyangkut keamanan dan kesehatan.

Kebijakan dibidang kepariwisataan adalah berbagai macam aturan, strategi dan sasaran pembangunan atau promosi pariwisata yang menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan dalam jangka pendek dan panjang. Kebijakan ini harus memberikan jaminan bahwa tujuan utamanya adalah membuat masyarakat yang bersangkutan yang tinggal di destinasi pariwisata memperoleh keuntungan optimal dari kontribusi kepariwisataan dibidang sosial dan ekonomi dalam bentuk kemajuan kualitas hidup. Edgell dan Swanson (Antariksa, 2016: 8) berpendapat bahwa pada intinya kebijakan dibidang legislatif, administratif, maupun yudisial yang berpengaruh terhadap kepariwisataan.

Sunaryo (2013: 103) menjelaskan bahwa mandate yang sangat penting yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, terutama terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia adalah diberikannya kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan sesuai dengan tingkatan kewenangannya. Pemerintah (pusat) disamping kewenangan untuk menetapkan Norma-Standar-Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta kewenangannya dalam memberikan fasilitasi

dan regulasi penyelenggaraan kepariwisataan nasional, juga diberikan kewenangan untuk menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Pemerintah. Sedangkan Pemerintah Provinsi disamping kewenangannya untuk melakukan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata serta melakukan promosi pariwisata yang ada di wilayahnya, juga diberikan wewenang untuk menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota disamping mempunyai sejumlah kewenangan untuk melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, memfasilitasi dan melakukan dan menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2.3 Tata Kelola Kepariwisata yang Baik (*Good Tourism Governance*)

Prinsip tata kelola kepariwisataan yang baik ini pada intinya adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antar pihak pemerintah, swasta/industri pariwisata, dan masyarakat setempat terkait (Sunaryo, 2013:77).

Secara teoritis pola manajemen dari penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan berwawasan lingkungan akan dapat dengan mudah dikenali melalui berbagai ciri-ciri penyelenggaraan yang berbasis pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Terkait; Masyarakat terkait harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan data tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.
2. Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan; Para pemangku kepentingan yang harus terlibat aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat Pariwisata), kelompok sukarelawan, Pemerintah Daerah, Asosiasi Industri Wisata, Asosiasi Bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.
3. Kemitraan Kepemilikan Lokal; Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan kerja yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Usaha fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, cinderamata, transportasi dan sebagainya, seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat melalui model kemitraan yang sinergis. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahaan setempat benar-benar

dibutuhkan dalam mewujudkan kerjasama kemitraan kepemilikan usaha. Lebih lanjut keterkaitan (*linkages*) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat setempat harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal dari berbagai usaha tersebut.

4. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut; Pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya yang dibutuhkan secara berlanjut, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan. Dalam pelaksanaannya, program kegiatan pembangunan kepariwisataan harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku.
5. Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat; Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara: pengunjung/wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan dengan baik. Misalnya, kerjasama dalam pengembangan atraksi wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen sampai pada pemasaran.
6. Daya Dukung Lingkungan; Daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang harus dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan yang utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotik, sosial-ekonomi dan

budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada. Program dan kegiatan serta pengoperasiannya seharusnya dipantau dan dievaluasi secara reguler sehingga dapat dilakukan penyesuaian /perbaikan yang dibutuhkan secara dini. Skala dan tipe fasilitas wisata harus diupayakan tidak melampaui batas ambang penggunaan yang dapat di toleransi (*limits of acceptable use*).

7. Monitor dan Evaluasi Program; Kegiatan dan monitor evaluasi dalam program pembangunan kepariwisataan yang berlanjut mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala internasional, nasional, regional dan lokal.
8. Akuntabilitas Lingkungan; Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat setempat yang tercermin dengan jelas dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air dan udara harus menjamin akuntabilitas kinerja yang tinggi serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

9. Pelatihan Pada Masyarakat Terkait; Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara *vocational* dan *professional*. Pelatihan sebaiknya diarahkan pada topik-topik pelatihan tentang kepariwisataan berlanjut, manajemen perhotelan secara berlanjut serta topik-topik yang relevan dengan wawasan keberlanjutan pembangunan kepariwisataan yang holistik.
10. Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan; Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-program dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter *lansekap (sense of place)* dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan.

Edgell dan Swanson (Antariksa, 2016: 8-9) berpendapat bahwa, pada intinya kebijakan dibidang kepariwisataan adalah setiap tindakan pemerintah baik dibidang legislatif, administratif maupun yudisial yang berpengaruh terhadap kepariwisataan. Termasuk di dalamnya aktivitas pemasaran, perencanaan dan keberlanjutan. Menurut mereka, bentuk kebijakan tersebut adalah berbagai pedoman (aturan), prinsip dan prosedur yang disusun secara etis dan sifatnya fokus terhadap suatu persoalan serta mewakili harapan suatu masyarakat atau

bangsa dalam hubungannya dengan aspek perencanaan, pembangunan, produk, jasa, pemasaran dan aspek keberlanjutannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan metodologi penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

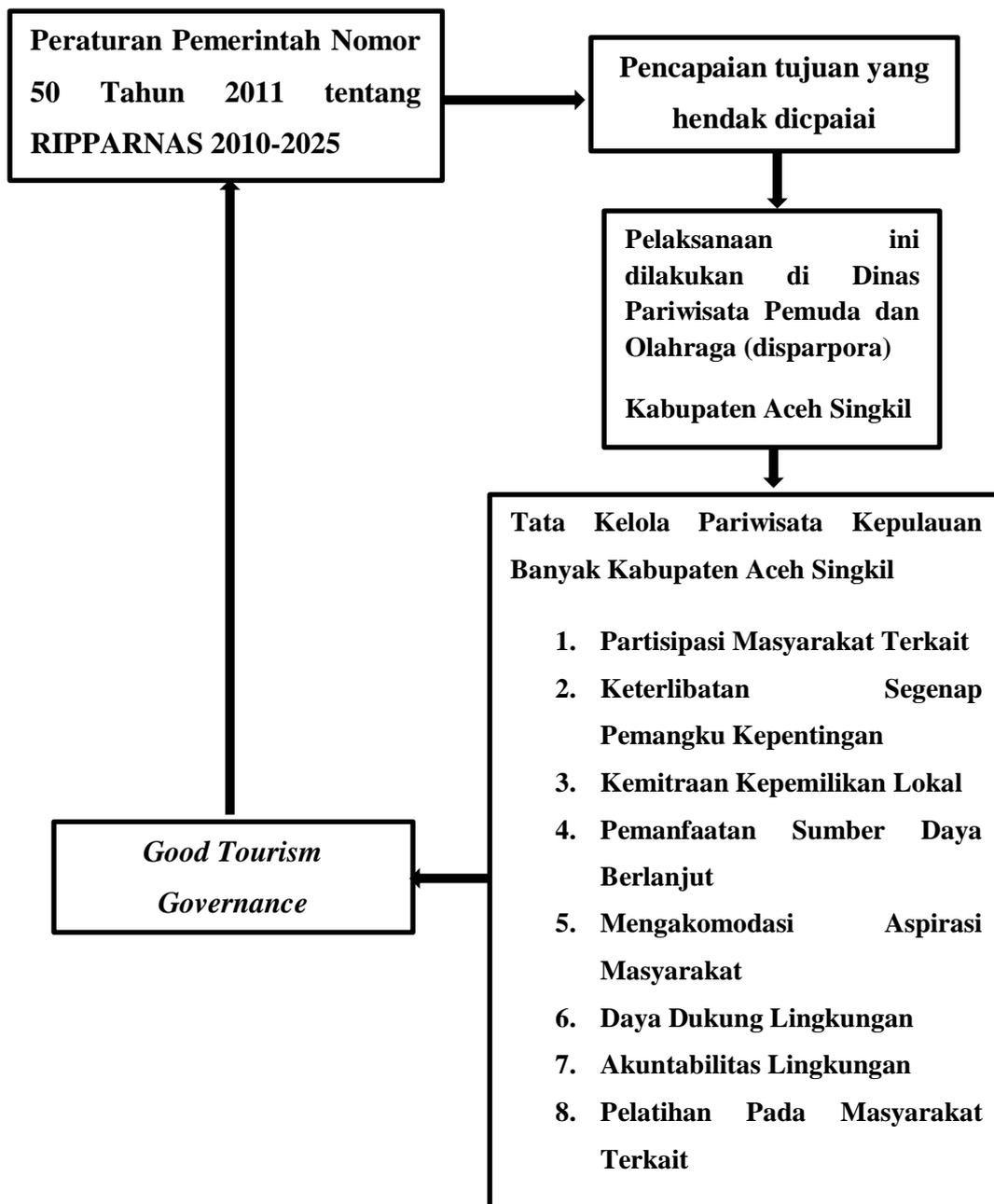
Moleong (2012: 5) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan penelitian deskriptif yang juga dikemukakan oleh Moleong (2012: 11) yaitu dimana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya.

Pemilihan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif tersebut karena peneliti ingin melihat dan menggambarkan fenomena yang terjadi pada Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Dengan demikian peneliti berharap bisa mengumpulkan dan menganalisis data yang di

dapat secara baik dan benar, untuk menggambarkan bagaimana Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3 Defenisi Konsep

1. Administrasi Publik adalah rangkain proses kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengedepankan pada demokratisasi dalam menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan pencapaian tujuan negara.
2. Tata Kelola (*Governance*) adalah hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya yang memungkinkan berbagai kebijakan publik dan program dirumuskan, dilaksanakan dan dievaluasi.
3. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan dengan berputar-putar yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ke tempat lain yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah tempat tujuan wisata itu sendiri.
4. Prinsip-prinsip Pariwisata menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal.
5. Karakteristik Pariwisata bersifat lokal sehingga aktivitas yang terjadi secara geografis dan geofisik dilakukan di tempat daya tarik lokal bukan di tempat asal wisatawan.
6. Kebijakan Pariwisata adalah berbagai macam aturan, strategi dan sasaran pembangunan atau promosi pariwisata yang menjadi pedoman bagi pengambil keputusan dalam jangka pendek dan panjang.

7. *Good Tourism Governance* adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis antara pihak pemerintah, swasta/industri, dan masyarakat setempat terkait.

3.4 Kategorisasi

1. Adanya partisipasi masyarakat terkait
2. Adanya keterlibatan segenap pemangku kepentingan
3. Adanya kemitraan kepemilikan lokal
4. Adanya pemanfaatan sumber daya secara berlanjut
5. Adanya mengakomodasikan aspirasi masyarakat
6. Adanya daya dukung lingkungan
7. Adanya akuntabilitas lingkungan
8. Adanya pelatihan pada masyarakat terkait

3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat oleh pewawancara dengan memiliki keinginan untuk menjalin kerjasama dengan peneliti.

Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu:

a. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil

1) Nama : Drs. Syamla

Umur : 50 Tahun

Jabatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

2) Nama : Surkani, SE

Umur : 46 Tahun

Jabatan : Kabid Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

3) Nama : Satiman, SE

Umur: 41 Tahun

Jabatan : Kabid Pemasaran Pariwisata

b. Pelaku Usaha dan Kelompok masyarakat

1) Pelaku Usaha

a. Nama : Mirzal

Umur : 42 Tahun

b. Nama : Wandu

Umur : 41 Tahun

2) *Tour Guide*

Nama : Sadriansyah Berutu, S. IP

Umur: 26 Tahun

3) Kelompok Masyarakat

Nama : Sudirman

Umur: 50

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Data Primer

Pengumpulan data yang diperoleh dari responden (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Moleong (2003: 103) adalah proses mengatur urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Adapun teknik analisa data yang penulis ambil yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukannya analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta mengilangkan yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*data display*)

Data yang disusun dari hasil reduksi, kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data bisa berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dari penyajian data ini diharapkan peneliti mampu memahami yang terjadi, sehingga dapat menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian adalah suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian. Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil Jl. Singkil-Rimo Km. 12.5.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan yaitu bulan April sampai dengan Mei 2021 yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil adalah sebuah daerah yang berada di ujung barat daya Provinsi Aceh, Indonesia. Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten ini adalah Kepulauan Banyak. Kecamatan Singkil merupakan Ibu Kota Kabupaten ini.

Terbentuknya Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999. Makmur Syahputra SH, dilantik sebagai Pejabat Bupati Aceh Singkil pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Peresmian Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1999 oleh Gubernur Provinsi Aceh dilapangan Daulat Aceh Singkil. Secara geografis, Aceh Singkil terletak pada koordinat $2^{\circ} 02' - 2^{\circ} 27' 30''$ Lintang Utara / $97^{\circ} 04' - 97^{\circ} 45' 00''$ Bujur timur dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Singkil memiliki luas wilayah 3.578 km yang terdiri dari 11 Kecamatan, 23 Mukim dan 190 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk di Aceh Singkil adalah 154.516 jiwa. Kecamatan-kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

1. Kecamatan Danau Paris
2. Kecamatan Gunung Meriah
3. Kecamatan Kota Baharu
4. Kecamatan Kuala Baru
5. Kecamatan Pulau Banyak

6. Kecamatan Pulau Banyak Barat
7. Kecamatan Simpang Kanan
8. Kecamatan Singkil
9. Kecamatan Singkil Utara
10. Kecamatan Singkohor
11. Kecamatan Suro Baru

3.9.2 Visi dan Misi Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil

Adapun Visi Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil, yaitu:

Pengembangan Pariwisata Aceh Singkil yang berlandaskan nilai-nilai Islam, maju, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Adapun Misi Pariwisata Kabupaten Aceh Singkil, yaitu:

1. Kabupaten Aceh Singkil sebagai destinasi wisata yang menarik, aman, nyaman relatif mudah dicapai, berwawasan lingkungan, dan bercorak islami meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat.
2. Industri pariwisata yang berkualitas, bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
3. Pemasaran pariwisata Aceh Singkil yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
4. Kelembagaan dan sumber daya manusia Aceh Singkil yang efektif dan efisien serta kompeten dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataaan yang berkelanjutan.

3.9.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil

a. Tugas

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4. Penyelenggaraan tugas pelayanan umum dilingkup Dinas;
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilingkup Dinas;
7. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

Bertugas memimpin Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Adapun rincian Tugas Jabatan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Singkil adalah:

- Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.
- Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya.
- Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi.
- Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir.
- Mengawasi penyusunan kebijakan umum daerah dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Pemuda dan Olahraga yang meliputi program kerja tahunan, jangka

menengah dan jangka panjang agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Pemuda dan Olahraga di daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati untuk pedoman pelaksanaan tugas.
- Menandatangani dan memaraf naskah dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan dalam rangka kelancaran administrasi.
- Mengendalikan kegiatan pembinaan teknis dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis, work shop, seminar dan loka-karya dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia.
- Mengendalikan kegiatan pembinaan terhadap usaha pariwisata di Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan dalam rangka peningkatan usaha dunia pariwisata.
- Mengawasi pelaksanaan pemberian rekomendasi, perizinan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan usaha dibidang Pariwisata.
- Mengendalikan pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- Mengendalikan pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum dibidang pemuda dan olahraga sesuai dengan ketentuan

da kebutuhan dalam rangka pengembangan dibidang pemuda dan olahraga.

- Mengkoordinir kegiatan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- Melakukan pembinaan terhadap unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), sesuai ketentuan dan Kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.
- Mengkoordinir kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahan.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas terbagi habis.
- Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan masukan untuk penyusunan program selanjutnya.

2. Sekretaris

Bertugas memimpin Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi

di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil.

Adapun rincian tugas Jabatan Sekretaris yaitu:

- Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas.
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.
- Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya.
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi.
- Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier.
- Mengendalikan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sesuai ketentuan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.
- Mengendalikan kegiatan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.

- Mengendalikan kegiatan penyiapan data dan informasi dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka pemenuhan kebutuhan data dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga.
- Mengendalikan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya.
- Mengawasi kegiatan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, dan perpustakaan sesuai ketentuan dan kebutuhan agar kegiatan dinas dapat berjalan dengan lancar.
- Mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai.
- Mengawasi pelaksanaan kegiatan organisasi dan ketatalaksanaan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan kinerja dinas.
- Mengawasi pelaksanaan kegiatan hukum dan perundang-undangan sesuai ketentuan dalam rangka tersusunnya produk hukum.
- Mengendalikan pelaksanaan hubungan masyarakat sesuai ketentuan dalam rangka penyebarluasan informasi pariwisata, pemuda dan olahraga.
- Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan sesuai ketentuan dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan.

- Mengendalikan dan mengorganisir pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana pembangunan dari APBK sesuai ketentuan dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan.
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas terbagi habis.
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

3. Kepala Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bertugas memimpin Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempuyai tugas menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan dibidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif meliputi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil.

Adapun tugas Jabatan Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara rinci adalah:

- Perumusan kebijakan teknis pembangunan destinasi wisata.
- Pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan pariwisata.

- Penyelenggaraan pengembangan destinasi pariwisata, ekonomi kreatif dan usaha wisata.
- Koordinasi tugas bidang pengembangan destinasi pariwisata.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata, kelompok karya kreatif dan pelaku usaha pariwisata.
- Mengawasi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata dan usaha pariwisata serta ekonomi kreatif sesuai ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- Mengawasi pelaksanaan kegiatan analisis dan penyusunan data kepariwisataan dan ekonomi kreatif sesuai dengan jenis dan sifatnya dalam rangka keakuratan data.
- Mengkoordinir penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata dan ekonomi kreatif sehingga terdapat acuan dan skala prioritas dalam pengembangan ke depan.
- Merumuskan penyusunan bahan standarisasi dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif sebagai bahan pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- Mengawasi penyusunan bahan fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif agar sesuai dengan ketentuan dan program yang telah ditentukan.
- Mengawasi penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin usaha pariwisata untuk terkelolanya usaha jasa pariwisata dalam rangka kepastian dan tepat waktu.

- Mengkoordinir pengembangan destinasi wisata, daya tarik wisata, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga saling bersinergi dalam mencapai tujuan.
- Mengawasi pemantauan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif agar adanya kesesuaian pelaksanaan program dengan laporan yang dibuat.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas terbagi habis.
- Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan masukan untuk penyusunan program selanjutnya.

4. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

Bertugas memimpin Bidang Pemasaran Pariwisata dalam menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang pemasaran pariwisata meliputi promosi, pengembangan dan analisa pasar, kerjasama dan kemitraan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil.

Adapun tugas Jabatan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata secara rinci yaitu:

- Perumusan kebijakan teknis pembangunan destinasi wisata.
- Pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan pariwisata.

- Penyelenggaraan pengembangan destinasi pariwisata, ekonomi kreatif dan usaha wisata.
- Koordinasi tugas bidang pengembangan destinasi pariwisata.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan destinasi pariwisata, kelompok karya kreatif dan pelaku usaha pariwisata.
- Mengawasi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis promosi, pengembangan dan analisis pasar, kerjasama dan kemitraan.
- Mengatur penyelenggaraan analisis data bahan promosi, kerjasama dan kemitraan berdasarkan prioritas target yang akan dicapai.
- Mengawasi penyusunan bahan kegiatan promosi kepariwisataan.
- Mengkoordinir penyelenggaraan penyusunan bahan kegiatan pengembangan promosi dan informasi pariwisata untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- Mengawasi penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kebijakan pengembangan dan analisa pasar, promosi dan informasi pasar sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan.
- Mengawasi penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kebijakan pengembangan kerjasama dan kemitraan pariwisata untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan.
- Mengkoordinir penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemasaran pariwisata untuk kelancaran proses evaluasi, monitoring, evaluasi dan lain-lain.

- Mengkoordinir penyelenggaraan penyusunan bahan koordinasi promosi, pengembangan dan analisa pasar, kerjasama dan kemitraan untuk tercapainya penyusunan pekerjaan.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas terbagi habis.
- Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan masukan untuk penyusunan program selanjutnya.

5. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga

Bertugas memimpin dan menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan teknis dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana pemuda dan olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil.

Adapun tugas Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga secara rinci yaitu:

- Membuat rencana kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya.
- Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.
- Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi.

- Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir.
- Penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kepemudaan dan olahraga.
- Penyelenggaraan penyusunan data kepemudaan, olahraga dan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga.
- Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan dan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.
- Penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan, keolahragaan dan sarana prasarana.
- Penyelenggaraan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembinaan kepemudaan dan olahraga.
- Penyelenggaraan penyaluran bantuan sarana prasarana untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga.
- Penyelenggaraan penyusunan bahan koordinasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan olahraga.
- Penyelenggaraan penyusunan bahan kegiatan pengawasan dan pengendalian tentang pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana.
- Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga.

- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemuda dan olahraga.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas terbagi habis.
- Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan masukan untuk penyusunan program selanjutnya.

Gambar 3. 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Aceh Singkil

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara Tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pernyataan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang di peroleh sebagai berikut:

4.1.1 Adanya Partisipasi Masyarakat Terkait

Dalam melaksanakan tugas kehidupan dan pembangunan khususnya pembangunan pariwisata, masyarakat dituntut untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Pernyataan ini bertujuan untuk mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan itu sendiri.

Hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Drs. Syamla selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 17 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Sebagaimana yang kita pahami bahwa dalam setiap usaha dan program yang dilakukan oleh pemerintah ini secara otomatis masyarakat pasti diikuti sertakan sebagai fungsi controlling karena yang menjadi aktor yang sesungguhnya dalam pembangunan pariwisata adalah masyarakat. Jadi bersinergi sekali ketika pemerintah mengajak kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat agar bisa mengawal program pembangunan kepariwisataan. Sejauh ini pemerintah selalu berupaya untuk mengajak dan mengundang stakeholder yang terkait dalam merumuskan visi, misi dan tujuan serta menginformasikan dan mensosialisasikan wilayah atau kawasan apa saja yang bisa

dikembangkan dan dimanfaatkan dalam pengelolaan daya tarik wisata. Disamping itu pemerintah juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana yang telah disusun sebelumnya.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Surkani, SE selaku Kepala Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 18 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Yang jelas dalam pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil selalu melibatkan masyarakat setempat dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan pariwisata dalam rangka kemajuan kepariwisataan di Aceh Singkil. Jadi tidak bisa berdiri sendiri saja dalam menentukan kebijakan pembangunan di kepulauan banyak. Hal ini dapat kita lihat dari setiap musrenbang yang ada di desa, kecamatan maupun kabupaten, kita selalu mengundang komponen masyarakat. Artinya partisipasi yang diberikan pemerintah seluas-luasnya untuk mengusulkan kebutuhannya dalam pengembangan pariwisata baik dari segi fisik maupun sumber daya manusia. Jadi tidak serta merta pemerintah menentukan keinginannya saja. Pemerintah juga membuka peluang untuk masyarakat agar bisa ikut berpartisipasi untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun sebelumnya.

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Satiman, SE selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 19 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Seiring dengan perkembangan kepariwisataan kepulauan banyak tentu kita melibatkan masyarakat karena peran serta masyarakat ini sangat penting untuk mengawasi dan mengontrol setiap gerak pembangunan kepariwisataan di kepulauan banyak.

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Mirzal selaku Pelaku Usaha Pariwisata Kepulauan Banyak pada tanggal 21 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Sejauh ini dalam hal terlibatnya masyarakat dalam mengontrol dan mengawasi pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak pemerintah kabupaten aceh singkil memang memberikan ruang tetapi informasi terkait program-program apa saja yang akan dilaksanakan dan dibangun itu kita tidak mengetahui secara pasti. Disamping itu dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak juga saya sendiri sebagai pelaku usaha lokal tidak mengetahui secara pasti apa visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak. Maka hal ini menjadi faktor penyebab masyarakat tidak sepenuhnya untuk ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana yang sudah disusun sebelumnya karena tidak ada informasi yang cukup jelas”.

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Mirzal, selaku

Pelaku Usaha pada tanggal 21 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Tidak sepenuhnya. Dalam proses untuk menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan saya sendiri sebagai pelaku usaha lokal tidak mengetahui jelas tentang informasi kapan itu direncanakan dan ditetapkannya. Disamping itu kami juga tidak mengetahui apakah dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan sudah dilaksanakan secara khusus atau belum.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Wandu selaku

Pelaku Usaha pada tanggal 22 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Sejauh ini tanggapan atau pedulinya pemerintah kabupaten aceh singkil sejak ditetapkannya kepulauan banyak menjadi destinasi wisata oleh pemerintah provinsi aceh selalu memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengontrol dan mengawasi setiap program pembangunan meskipun belum maksimal. Disamping itu pemerintah daerah juga berkoordinasi kepada pemerintah desa dan kecamatan terkait wilayah atau kawasan-kawasan yang bisa dikelola, dikembangkan dan dilindungi”.

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Wandu selaku

kelompok masyarakat pada tanggal 23 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Sejauh ini pemerintah selalu menghimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan mengontrol pembangunan kepariwisataan di kepulauan banyak. Dalam hal untuk menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak

ini sendiri kami tidak tau pasti dan tidak mendapat informasi apakah sudah dilaksanakan atau belum. Justru hal ini yang membuat kami kesulitan untuk bisa ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang sudah disusun sebelumnya”.

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Sadriansyah Berutu, S. IP selaku *Tour Guide* pada tanggal 24 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Tidak sepenuhnya diberikan. Hal ini dapat dilihat bahwa karena tidak adanya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat terkait hal-hal apa saja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sejauh apa perkembangan pembangunannya, bagaimana strategi dan aturan-aturan yang dibuat. Tentu hal ini menjadikan masyarakat tidak secara keseluruhan diberikan ruang untuk mengawasi mengontrol dan mengimplementasikan dari program pembangunan yang sudah disusun sebelumnya.”

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Sudirman, selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 28 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Sejauh ini, pemerintah kabupaten aceh singkil selalu memberikan ruang untuk terus mengontrol dan mengawasi pembangunan pariwisata di kepulauan banyak. Kita masih tahapan sosialisasi dan koordinasi dalam menentukannya, karena visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan di kepulauan banyak secara permanen belum ada atau mungkin walaupun ada informasinya belum di publikasikan. Masyarakat juga diberikan ruang untuk mengimplementasikan program yang telah disusun sebelumnya, karena seluruh pembangunan itu kita upayakan tetap berkaitan untuk masyarakat khususnya.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap narasumber dapat disimpulkan bahwa Adanya Partisipasi Masyarakat Terkait dalam Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil belum sepenuhnya terlibat, karena kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat dalam hal menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata.

Disamping itu masyarakat juga tidak mendapatkan informasi secara jelas tentang rencana dan program yang telah disusun sebelumnya. Hal ini menjadi faktor terkendalanya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

4.1.2 Adanya Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

Pembangunan pariwisata tidak terlepas dari peran pemangku kepentingan, diantaranya pemerintah sebagai pembuat dan penyusun kebijakan, swasta sebagai pelaku usaha, akademisi, masyarakat, maupun pihak lainnya. Peranan para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata menghadirkan konsepsi pengembangan wisata yang tidak bisa dilakukan secara sendirian dan menuntut kebersamaan arah tindak dan keseimbangan para pemangku kepentingan.

Hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Drs. Syamla selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 17 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Keterlibatan segenap pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Gerakan Pesona Indonesia (GENPI) dan lain-lain belum sepenuhnya terlihat aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak.

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Surkani, SE selaku Kepala Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 18 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Keterlibatan pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Gerakan Pesona Indonesia (GENPI), dan berbagai

macam komunitas-komunitas lainnya terlihat aktif dan proktif dalam pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak meskipun belum maksimal.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Satiman, SE selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 19 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Keterlibatan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Gerakan Pesona Indonesia (GENPI), Himpunan Pramuwisata Indonesia sudah terlibat dan terlihat sangat aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak.”

Hasil wawancara yang di peroleh dengan Bapak Mirzal selaku Pelaku Usaha pada tanggal 21 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Pemerintah Daerah, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS, BUMDES, Gerakan Pesona Indonesia (GENPI), berbagai kelompok-kelompok Tour Guide, Penginapan dan lain-lain sudah terlibat cukup aktif dan dalam belum produktif secara maksimal dalam pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak.”

Kemudian hasil wawancara yang di peroleh dengan Bapak Wandu selaku Pelaku Usaha pada tanggal 22 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Sejauh ini keterlibatan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Kelompok Sadar Wisata, Gerakan Pesona Indonesia (GENPI) sudah cukup terlihat aktif dan belum sepenuhnya produktif dalam pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Sadriansyah Berutu S. IP selaku *Tour Guide* pada tanggal 23 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Keterlibatan aktif Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Gerakan Pesona Indonesia (GENPI) belum sepenuhnya memberika produktifitas dalam pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak.”

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Sudirman selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 24 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Keterlibatan aktif segenap pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Gerakan Pesona Indonesia (GENPI) dalam pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak belum terlihat produktifitasnya. Adapun Asosiasi Industri Wisata, Asosiasi Bisnis belum terlihat aktif dan produktif.

Hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber dapat disimpulkan bahwa adanya keterlibatan segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak sudah terlibat aktif. Meskipun ada beberapa kendala terhadap produktifitasnya.

4.1.3 Adanya Kemitraan Kepemilikan Lokal

Kemitraan merupakan suatu usaha sejenis kerjasama yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat yang mempunyai peranan yang sama, bersifat sukarela dan berdasarkan pedoman saling membutuhkan satu sama lain, saling memberi dukungan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam menjalankan kemitraan kedua belah pihak harus saling percaya satu sama lain yang dibutuhkan adalah sebuah komunikasi atau penyampaian yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menunjang kepemilikan lokal.

Hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Drs. Syamla selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 17 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Pada prinsipnya pemerintah menginginkan seperti itu, bahwa pembangunan pariwisata kepulauan banyak ini juga menghidupkan

keaktifitas masyarakat. Kalau kita lihat sekarang justru seperti Penginapan di beberapa pulau-pulau masih banyak di kelola oleh orang-orang dari luar, karena mungkin terkendala dengan dana. Seperti di pulau panjang sendiri ada bumdes, tetapi sejauh ini kita melihat bahwa sedikit agak menurun, justru orang yang punya banyak dana orang dari luar. Tentu hal ini pemerintah tidak tinggal diam untuk berupaya membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat. Hanya saja mungkin sepertinya masyarakat belum diberikan secara maksimal. Disamping itu hubungan kerjasama antara pelaku-pelaku usaha transportasi, penginapan, rumah makan dan lain-lain sangat berkaitan dalam mewujudkan kemitraan kepemilikan usaha.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Surkani, SE selaku Kepala Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 18 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Jelas, artinya pembangunan yang selama ini kita lakukan semuanya melibatkan masyarakat, contohnya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Desa Wisata ini semuanya yang bekerja itu masyarakat, yang menikmati masyarakat. Kerjasama antara pelaku usaha transportasi, penginapan, rumah makan dan lain-lain dengan masyarakat terlihat saling membutuhkan satu sama lain untuk mewujudkan kemitraan kepemilikan usaha.”

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Satiman, SE selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 19 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Seiring dengan berkembangnya pariwisata kepulauan banyak tentunya membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, melalui dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di beberapa desa yang ada di kepulauan banyak dan usaha fasilitas penunjang pariwisata yang secara otomatis membutuhkan tenaga kerja. Dengan terbukanya lapangan pekerjaan tentu hal ini menyebabkan seluruh pelaku usaha seperti transportasi, penginapan, rumah makan dan lain-lain saling bekerjasama dan sangat bergantung satu sama lain.”

Kemudian hasil wawancara yang di peroleh dengan Bapak Mizal selaku Pelaku Usaha tanggal 21 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Dengan saling bekerjasama dan terkaitnya antara pelaku usaha transportasi, penginapan, rumah makan dan lain-lain telah membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas bagi masyarakat.”

Selanjutnya hasil wawancara yang di peroleh dengan Bapak Wandu selaku Pelaku Usaha pada tanggal 22 Mei 2021 menyatakan bahwa

“bahwa sebagai wisatawan non lokal berharap pengembangan program-program yang dibuat oleh pengelola wisata dapat di nikmati oleh wisatawan sehingga tidak merasa bosan”.

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Sadriansyah Berutu selaku *Tour Guide* pada tanggal 23 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Ya, ditandai dengan saling bekerjasamanya antara tour guide dengan pelaku usaha transportasi, penginapan dan rumah makan yang dimiliki masyarakat lokal sendiri.”

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Sudirman selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 24 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Belum sepenuhnya terbuka karena fasilitas penunjang pariwisata seperti penginapan, hotel dan lain-lain masih minim. Hal ini salah satu menjadi kendala terbukanya lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Disamping itu tentu hal ini membuat pelaku usaha untuk terus menunjang kepemilikan lokal dengan cara bekerjasama antara pelaku usaha rumah makan, penginapan, transportasi dalam menunjang kepemilikan lokal dari usaha tersebut.

Hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber dapat disimpulkan bahwa adanya kemitraan kepemilikan lokal hampir sepenuhnya tercapai karena ada beberapa kendala seperti kurangnya dana bagi masyarakat untuk membangun fasilitas penunjang wisata dan membeli alat-alat yang dibutuhkan dalam aktivitas pariwisata.

4.1.4 Adanya Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Beberapa solusi diambil oleh sektor publik untuk mengatur pengembangan pariwisata agar menjadi lebih baik dan menempatkan masalah pariwisata yang berkelanjutan sebagai prioritas agar manfaat dari pariwisata tidak hanya dirasakan pada masa sekarang melainkan di masa yang akan datang.

Hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Drs. Syamla selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil tanggal 17 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Pemerintah belum bisa menjamin secara pasti sumber daya alam dan buatan dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku karena pemerintah sejauh ini masih dalam tahapan perencanaan untuk mengidentifikasi potensi yang ada untuk bisa dikembangkan.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Surkani, SE selaku Kepala Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tanggal 18 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Pengembangan pariwisata di kepulauan banyak semuanya harus memperhatikan dampak lingkungan karena kepulauan banyak itu berada pada taman wisata alam dan wilayah konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui BKSDA. Artinya seluruh aktifitas pariwisata di kepulauan banyak itu harus memperhatikan masalah dampak lingkungan. Semuanya diatur agar demi keberlanjutan pariwisata, bahkan di pulau-pulau kecil kalau ada pembangunan fasilitas penunjang wisata tidak dibenarkan memakai material yang tidak ramah lingkungan seperti besi, semen dan lain-lain demi terjaganya ekosistem dari sumber daya yang ada.

Tentu hal ini pemerintah tidak bisa menjamin sepenuhnya dalam menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku. Tetapi pemerintah terus berupaya untuk mengawasi setiap gerak pembangunan yang ada.

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Satiman, SE selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 19 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Langkah pemerintah dalam mengantisipasi penggunaan sumber daya secara berlebihan dengan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap menjaga kelestarian alam demi keberlanjutan kegiatan dan aktifitas pariwisata.”

Kemudian hasil wawancara yang di peroleh dengan Mirzal selaku Pelaku Usaha pada tanggal 21 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Sejauh ini kami sebagai pelaku usaha terus melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait dengan pengembangan pariwisata kepulauan banyak agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membangun dan memperbaharunya secara berlebihan. Tentu hal ini pemerintah terus melakukan sosialisasi dan mengatur penggunaan bahan-bahan material yang dinilai akan merusak ekosistem yang ada demi keberlanjutan aktifitas pariwisata.”

Hal senada yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Wandu selaku Pelaku Usaha pada tanggal 21 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Koordinasi antara pelaku usaha dengan pemerintah terkait dalam melakukan pembangunan guna mengembangkan pariwisata kepulauan banyak terus dilakukan agar tidak terjadi pembaharuan secara berlebihan. Dalam hal ini pemerintah terus melakukan pengawasan dari aturan penggunaan material yang dinilai dapat merusak ekosistem di kawasan destinasi.

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Sadriansyah Berutu, S. IP selaku *Tour Guide* pada tanggal 22 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Selain mengatur penggunaan material bahan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata, pemerintah juga mengajak tour guide untuk ikut menjaga lingkungan serta memberikan pemahaman kepada para wisatawan yang dibawahnya untuk tetap menjaga lingkungan demi keberlanjutan aktifitas pariwisata.”

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Sudirman selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 24 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam aturan tentang penggunaan material dan peralatan dalam pengembangan pariwisata menjadikan salah satu kawasan destinasi tepatnya di Desa Asantola Kecamatan Pulau Banyak barat mengalami perubahan secara berlebihan dan menjadikan lingkungan dan alam nya tidak asri lagi.”

Hasil wawancara yang diperoleh dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa adanya pemanfaatan sumber daya berlanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kepulauan banyak hampir sepenuhnya dilaksanakan dengan. Namun terkendala dengan pengawasan yang kurang maksimal.

4.1.5 Adanya Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi dan tujuan masyarakat merupakan faktor pendukung dari segala kegiatan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Aspirasi masyarakat seharusnya diakomodasikan dalam proses perencanaan yang secara langsung melibatkan masyarakat untuk penentuan arah, strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan alat untuk memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan dan program-program pembangunan.

Hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Drs. Syamla selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 17 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Sejauh ini hubungan antara pengunjung, pelaku usaha dan masyarakat setempat terlihat sangat harmonis. Tentunya hal ini dampak dari diakomodasikannya aspirasi dari masyarakat setempat dalam perencanaan, manajemen sampai pada pemasaran mekipun belum secara maksimal.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Surkani, SE selaku Kepala Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 18 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Tentu dalam program kegiatan pariwisata kepulauan banyak kita sudah berupaya mengakomodasikan aspirasi dan tujuan masyarakat setempat. Hal ini tertulis dalam hasil Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Aceh Singkil yang secara keseluruhan di himpun dari aspirasi masyarakat. Terselenggaranya Festival Pulau Banyak Internasional menjadi salah satu program yang diwujudkan dari aspirasi masyarakat. Tentu hal ini berdampak bagi keharmonisan antara pengunjung, pelaku usaha dan masyarakat setempat dalam kegiatan dan aktifitas pariwisata di kepulauan banyak.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Satiman, SE selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 19 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Tentu aspirasi dan tujuan masyarakat kita akomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan.”

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Mirzal selaku Pelaku Usaha pada tanggal 21 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Sudah diakomodasikan dalam bentuk menerima semua usulan, tetapi belum sepenuhnya terealisasi.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Wandu selaku Pelaku Usaha pada tanggal 22 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Ya, sejauh ini pemerintah mengakomodasikan seluruh program dan kegiatan yang diusulkan.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Sadriansyah Berutu, S. IP selaku *Tour Guide* pada tanggal 23 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Terselenggaranya Festival Pulau Banyak Internasional beberapa tahun lalu adalah bentuk dari terealisasinya salah satu dari banyaknya aspirasi dari masyarakat.”

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Sudirman selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 24 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Seluruh aspirasi dari masyarakat sudah diakomodasikan oleh pemerintah daerah. Hanya saja belum sepenuhnya terealisasikan.”

Hasil wawancara yang diperoleh dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa sudah diakomodasikannya aspirasi dari masyarakat. Tetapi belum sepenuhnya dapat terealisasikan.

4.1.6 Adanya Daya Dukung Lingkungan

Pembangunan pariwisata akan terus menghadapi berbagai masalah, baik itu dalam hal infrastruktur, daya dukung lingkungan maupun sosial budaya yang mungkin pada akhirnya akan menyebabkan degradasi terhadap pengembangan pariwisata. Jika tidak diantisipasi, tentu akan berdampak pada hilangnya keseimbangan. Sedangkan pembangunan pariwisata baru tanpa perencanaan yang jelas dan sesuai kaidah pembangunan maupun karakter daerahnya akan tumbuh secara tidak tertata.

Hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Drs. Syamla selaku sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 17 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Yang menjadi pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan adalah sosial, ekonomi dan budaya setempat. Sebagaimana yang dapat kita pahami bahwa kita berada di wilayah Provinsi Aceh yang sangat kental sekali dengan hukum syari’ah. Tentunya hal ini tipe dan skala fasilitas pariwisata kita adalah wisata halal. Memang ada beberapa kawasan yang dijadikan sebagai kawasan privasi yang ada fasilitasnya seperti bar beach dan lain-lain. Tentu fasilitas ini lokasinya sangat jauh dari pemukiman penduduk dan berada di pulau-pulau kecil dan jauh.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Surkani, SE selaku Kepala Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 18 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Yang jelas karena kepulauan banyak berada pada kawasan Taman Wisata Alam maka kita memperhatikan komponen lingkungan hidup yang berada di sekitar kawasan tersebut. Kemudian faktor sosial dan budaya juga menjadi pertimbangan dalam kegiatan kepariwisataan. Sejauh ini kita melihat dalam pengembangan fasilitas dan kegiatan pariwisata sesuai dan serasi, meskipun ada beberapa kawasan pulau-pulau kecil yang sifatnya privasi. Karena kita berada di Provinsi Aceh yang kuat dengan hukum syari’ah, jadi skala dan tipe fasilitas wisata kita adalah wisata halal.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Satiman, SE selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 19 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Pada prinsipnya pengembangan fasilitas dan kegiatan pariwisata di kepulauan banyak, pelaku usaha, bisnis dan lain-lain tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat terkait agar tidak

melebihi kapasitas-kapasitas lokal dan sesuai dengan tipe dan skala fasilitas pariwisata yang telah tertuang di RIPPDA Provinsi Aceh.”

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Mirzal selaku Pelaku Usaha pada tanggal 21 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Bahwa pembangunan dan pengembangan fasilitas pariwisata di kepulauan banyak tidak sepenuhnya sesuai dan serasi dengan batas kapasitas lokal karena ada beberapa kawasan yang sifatnya privasi yang fasilitas pariwisatanya menurut saya tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat dan tidak sesuai dengan tipe dan fasilitas pariwisata yang telah ditetapkan di RIPPDA Provinsi Aceh.”

Hal senada yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Wandi selaku Pelaku Usaha pada tanggal 22 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Ada beberapa kawasan yang dijadikan kawasan privasi yang pada prinsipnya hanya pengunjung tertentu yang bisa datang ke kawasan tersebut yang menyediakan fasilitas seperti bar beach dan lain lain. Tentu pengembangan fasilitas yang semacam ini tidak sesuai dan serasi dengan batas kapasitas lokal dan tidak sesuai dengan tipe dan skala fasilitas pariwisata yang telah ditetapkan di RIPPDA Provinsi Aceh”.

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Sadriansyah Berutu, S. IP selaku *Tour Guide* pada tanggal 23 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Wisata Halal yang dijadikan sebagai tipe dan skala dari fasilitas pariwisata sebagaimana yang telah ditetapkan di RIPPDA Provinsi Aceh harus diikuti agar pengembangan dan pembangunan fasilitas pariwisata sesuai dan serasi dengan batas kapasitas lokal di kepulauan banyak.”

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Sudirman selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 24 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Sejauh ini masih sesuai dan serasi dengan tipe dan fasilitas pariwisata yang di tetapkan di RIPPDA Provinsi Aceh. Tetapi kami dari masyarakat setempat tetap menyampaikan kepada pelaku usaha dan tour guide agar tetap mengikuti aturan dan tetap menjalankan syariat islam untuk yang muslim agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.”

Hasil wawancara yang diperoleh dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa pengembangan dan pembangunan fasilitas pariwisata di Kepulauan Banyak belum sepenuhnya sesuai dan serasi dengan batas kapasitas lokal. Hal ini disebabkan oleh adanya kawasan yang dijadikan kawasan privasi yang hanya orang-orang tertentu yang bisa berkunjung di kawasan tersebut.

4.1.7 Adanya Akuntabilitas Lingkungan

Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan. Pedoman atau alat-alat bantu pemantauan evaluasi dampak yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala internasional, nasional, regional dan lokal.

Hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Drs. Syamla selaku sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 17 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataann kepulauan banyak selalu merujuk pada aturan-aturan yang berlaku agar pembaharuan yang terjadi di kawasan destinasi tidak secara berlebihan. Selain itu kebijakan, program dan strateginya juga selalu memperhatikan masyarakat sekitar dalam mendapatkan kesempatan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Surkani, SE selaku Kepala Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 18 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Tentu, kita memperhatikan lingkungan yang ada. Contohnya seperti kita sudah membangun tempat pembuangan akhir sampah melalui dinas lingkungan hidup untuk menampung sampah-sampah yang berada di pulau-pulau kecil. Kemudian dari dinas DKP sendiri sudah melakukan sosialisasi dan melarang pengambilan terumbu karang dan biota-biota yang berada di kepulauan banyak. Selain itu dalam Kebijakan, program dan strategi nya kita selalu berupaya untuk mensejahterakan masyarakat setempat.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Satiman, SE selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 19 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemerintah daerah selalu berusaha dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan itu terus berdampak positif langsung kepada masyarakat baik melalui dana APBK, APBA dan tidak tertutup kemungkinan juga dari pemerintah pusat. Disamping itu pemerintah selalu berupaya dan berusaha untuk mencegah agar pembangunan pariwisata di kepulauan banyak tidak di eksploitasi secara berlebihan, karena kepulauan banyak ini adalah kawan Taman Wisata Alam (TWA).”

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Mirzal selaku Pelaku Usaha pada tanggal 21 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Saya sebagai pelaku usaha tidak mengetahui secara jelas dan pasti bagaimana kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.”

Hal senada yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Wandu selaku Pelaku Usaha pada tanggal 22 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak saya sebagai pelaku usaha tidak mendapatkan informasi kejelasannya seperti apa.”

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Sadriansyah Berutu, S. IP selaku *Tour Guide* pada tanggal 23 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Ya, sangat bertanggung jawab pada lingkungan, saya selaku tour guide selalu mengingatkan kepada wisatawan yang saya bawa untuk tidak membuang sampah sembarangan demi menjaga lingkungan, disamping itu saya juga mengingatkan kepada wisatawan kalau sedang snorkeling agar tidak menginjak terumbu karang yang ada demi menjaga lingkungan dan ekosistem laut. Kami juga sangat berharap kepada pemerintah agar dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan tidak di eksploitasi secara berlebihan. Disamping itu juga pemerintah dalam menentukan kebijakan, program dan strateginya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Sudirman selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 24 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Sejauh yang kita ikuti seperti didalam musrenbang kita selalu berupaya agar dalam kebijakan, program dan strategi pembangunannya selalu berdampak positif untuk masyarakat setempat dan juga selalu mengupayakan agar tidak dieksploitasi secara berlebihan.”

Hasil wawancara yang diperoleh dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa adanya akuntabilitas lingkungan di Kepulauan Banyak hampir sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Meskipun ada beberapa kendala terhadap penginformasian kepada masyarakat tentang bagaimana proses kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak yang telah ditetapkan.

4.1.8 Adanya Pelatihan Pada Masyarakat Terkait

Pelatihan yang dilakukan kepada masyarakat dalam pengembangan pariwisata akan berdampak pada peningkatan kemampuan masyarakat dari yang tidak memiliki kemampuan menjadi memiliki keterampilan dan

kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata. Selain itu juga terdapat perubahan dalam mata pencaharian warga masyarakat sehari-hari.

Hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Drs. Syamla selaku sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 17 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Pelatihan pada masyarakat terkait hampir setiap tahun kita laksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Topik-topik pada pelatihan ini mencakup seperti pelatihan Tour Guide, Transportasi, penginapan, home stay, hotel, rumah makan dan lain-lain. Namun yang menjadi kendala adalah belum adanya kelanjutan dari pelatihan yang kita laksanakan.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Surkani, SE selaku Kepala Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 18 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Pelatihan home stay, tour guide, konsumsi dan akomodasi, pelatihan dasar selama hampir tiap tahun kita laksanakan guna untuk meningkatkan standar pelayanan dalam kegiatan kepariwisataan. Disamping itu masyarakat juga sangat antusias dengan pelatihan yang kita laksanakan.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Satiman, SE selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 19 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Tidak adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan pelatihan kepada masyarakat terkait melainkan antusiasnya masyarakat dalam kegiatan pelatihan Tour Guide, penginapan, home stay, promosi yang kita laksanakan setiap tahunnya.”

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Mirzal selaku Pelaku Usaha pada tanggal 21 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Jauhnya lokasi pelatihan menjadi faktor terkendalanya masyarakat untuk ikut serta dalam pelatihan Tour Guide, penginapan, transportasi dan lain-lain yang dilaksanakan oleh DISPARPORA.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Wandu selaku Pelaku Usaha pada tanggal 22 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Pemerintah Daerah melalui DISPARPORA hampir setiap tahun melaksanakan pelatihan yang topiknya seperti pelatihan Tour Guide, penginapan, transportasi dan lain-lain. Namun tindak lanjut dari pelatihan ini tidak ada dan kami menganggap hanya sebagai formalitas saja.”

Hal senada yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Sadriansyah Berutu, S. IP selaku Tour Guide pada tanggal 23 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Tidak adanya tindak lanjut dari pelatihan Tour Guide, layanan penginapan, transportasi dan lain-lain dari DISPARPORA menjadikan masyarakat menilai bahwa pelatihan tersebut hanya sebatas formalitas saja.”

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Sudirman selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 24 Mei 2021 menyatakan bahwa

“Masyarakat sangat senang dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh DISPARPORA. Pelatihan yang pada dasarnya untuk membekali pengetahuan masyarakat terhadap aktifitas pariwisata yang topik-topiknya seperti pelatihan Tour Guide, layanan penginapan, transportasi dan lain-lain.”

Hasil wawancara yang diperoleh dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa pelatihan terhadap masyarakat terkait hampir setiap tahun dilaksanakan. Meskipun ada beberapa kendala seperti letak lokasi pelatihan bukan di kepulauan banyak itu sendiri dan tidak adanya tindak lanjut dari

pelatihan itu menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat bahwa pelatihan itu hanya sebagai formalitas saja.

4.2 Pembahasan

Hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap merujuk kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus dalam penelitian dari seluruh data yang telah diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

4.2.1 Adanya Partisipasi Masyarakat Terkait

Partisipasi masyarakat merupakan wujud dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan kepariwisataan. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat terkait pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam seluruh proses pembangunan kepariwisataan.

Sunaryo (2013: 78) menyebutkan bahwa masyarakat hendaknya ikut serta dalam mengawasi ataupun mengontrol setiap pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam penentuan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dalam daya tarik wisata guna untuk pengelolaan dan pengembangannya, serta berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.

Peneliti menilai bahwa adanya partisipasi masyarakat pada Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil telah dimulai sejak Kepulauan Banyak dijadikan sebagai destinasi pariwisata, perencanaan, program, pelaksanaan, hingga keikutsertaan mengawasi aktivitas pengelolaan pariwisata kepulauan banyak. Hal ini senada dengan penelitian Ardianto (2016:65) yang menjelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pariwisata meliputi keikutsertaan masyarakat membangun, memiliki dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya.

Secara keseluruhan Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat terkait. Namun dalam penerapan prinsip tersebut masih terkendala dengan beberapa permasalahan, yaitu terkait belum seluruhnya masyarakat diikutsertakan dalam proses penentuan visi misi dan tujuan pembangunannya karena ketidakjelasan informasi yang bisa dilihat oleh masyarakat yang mengakibatkan hanya anggota masyarakat tertentu yang ikut serta dalam kegiatannya hingga proses pengawasannya. Selain itu, berdasarkan tinjauan dari RIPPAR Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa pelibatan dan peran masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata masih rendah.

4.2.2 Adanya Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

Peran pemangku kepentingan dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan, salah satu pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan kepariwisataan adalah pemerintah namun

pemerintah memiliki keterbatasan. Pemangku kepentingan yang dapat terlibat dalam pengembangan pariwisata selain pemerintah adalah swasta dan masyarakat.

Sunaryo (2013: 78) menilai bahwa para pelaku dan pemangku kepentingan harus terlibat aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat Pariwisata), kelompok sukarelawan, Pemerintah Daerah, Asosiasi Industri Wisata, Asosiasi Bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan menerima manfaat dari kegiatan pariwisata. Sesuai dengan paparan teoritis dari Sunaryo tersebut bahwa dalam Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil para pemangku kepentingan harus terlibat dalam keseluruhan proses demi tercapainya tujuan dalam penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik.

Kabupaten Aceh Singkil masih belum memiliki asosiasi pariwisata yang berjalan dengan baik. Terdapat Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), akan tetapi tidak berjalan secara maksimal dan dalam keadaan tidak aktif. Keberadaan HPI sangat penting bagi perkembangan sektor pariwisata suatu daerah. HPI berfungsi sebagai motor penggerak sektor pariwisata, dan memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pelatihan pariwisata, serta mengeluarkan surat rekomendasi untuk sertifikasi maupun untuk mendapatkan lisensi guide tour profesional. Hal tersebut menyebabkan peran swasta dalam pengembangan pariwisata masih sangat lemah dan sulit untuk berkembang.

Terdapat kelompok-kelompok sadar wisata di Pulau Banyak. Kelompok sadar wisata ini memiliki fokus pada pengembangan daya tarik objek wisata, sosialisasi kepariwisataan, maupun pelestarian kebudayaan lokal. Beberapa di antaranya adalah Kelompok Sadar Wisata Pulau Banyak dan Kelompok Sadar Wisata Pulau Banyak Barat. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam kelompok sadar wisata ini seringkali melakukan sosialisasi dan membersihkan lokasi yang dijadikan tempat hilir mudik wisatawan yang berkunjung ke Pulau Banyak. Sosialisasi ini dilakukan untuk membantu dan mengembangkan daerah wisata melalui aksi bersih. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesadaran di masyarakat serta wisatawan untuk selalu menjaga kebersihan. Selain itu, Kelompok Sadar Wisata yang ada di Pulau Banyak Barat, lebih berfokus pada pengembangan kesenian lokal berupa tari-tarian asli daerah, khususnya di Desa Haloban, Pulau Tuangku yang secara historis merupakan pusat perkembangan peradaban di masa lampau. Selain itu, terdapat juga Badan Usaha Milik Desa Pulau Baguk yang memiliki fokus dalam mengelola dan membangun fasilitas pariwisata di Pulau Panjang. BUMDes Pulau Baguk mengembangkan pariwisata di Pulau Panjang dengan cara membangun gazebo, kantin, dan cottage serta fasilitas lain agar wisatawan yang berkunjung semakin banyak dan nyaman dalam berwisata.

Tabel 4.2.2.1 Kelompok Sadar Wisata

NAMA	ALAMAT	DAYA TARIK WISATA
Mawar Bahari	Pulau Baguk	Wisata Alam
Bahari Jaya	Pulau Balai	Wisata Alam

UMKM yang memenuhi standar nasional	1,20%	1,30%	1,40%	1,50%	1,50%	1,50%	1,60%	1,65%
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Rencana Kerja DISPARPORA Tahun 2021

Penerapan prinsip keterlibatan segenap pemangku kepentingan dalam *Good Tourism Governance* (Sunaryo, 2013: 78) belum optimal melihat keaktifan dan produktifitas pemangku kepentingan belum sepenuhnya terwujud. Penerapan prinsip tersebut sejauh ini terkendala oleh beberapa faktor, seperti rendahnya komunikasi pemerintah dengan aktor lainnya, tidak aktifnya asosiasi industri wisata dan bisnis sehingga belum dapat disinergikan, hingga kurangnya produktifitas dari pokdarwis dan genpi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardianto (2016: 67) yang juga menyatakan bahwa keterlibatan segenap pemangku kepentingan masih belum berjalan optimal dan keterlibatan masyarakat terlihat masih minim.

4.2.3 Adanya Kemitraan Kepemilikan Lokal

Kemitraan atau *partnership* dapat diartikan sebagai hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sunaryo (2013: 78) menjelaskan bahwa usaha fasilitas penunjang pariwisata seharusnya dikembangkan dan dipelihara dengan masyarakat setempat melalui model kemitraan yang sinergis. Lebih lanjut Sunaryo (2013: 78) juga menjelaskan bahwa keterkaitan antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat setempat harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal dari berbagai usaha tersebut.

Prinsip kemitraan kepemilikan lokal dalam Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil terlihat jelas dari berbagai usaha dan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha dan beberapa pihak swasta. Meskipun dalam penerapan prakteknya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan tidak secara keseluruhan masyarakat pada umumnya merasakan kebermanfaatannya atau dampak dari kemitraan tersebut. Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga masih seperti penitipan alat-alat penunjang pariwisata kepada beberapa pelaku usaha dan bisnis untuk disewakan kepada wisatawan. Kemitraan disini juga belum mampu mendorong munculnya kepemilikan lokal dari berbagai usaha fasilitas penunjang pariwisata di Kepulauan Banyak. Kondisi kemitraan tersebut berbeda dengan penelitian Ardianto (2016: 69) yang menyebutkan bahwa kemitraan kepemilikan lokal yang terjadi di Kabupaten Natuna hanya dengan adanya pasar oleh-oleh yang disediakan oleh pemerintah dengan sewa lahan usaha untuk berjualan, dimana penyediaannya pun masih sangat terbatas.

4.2.4 Adanya Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Setiap proses pembangunan hendaknya diarahkan untuk menghasilkan apa yang telah direncanakan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin (Jubaedah, Dawud, Mulyadi, et al, 2008: 32). Pembangunan kepariwisataan seharusnya dapat menggunakan sumber daya yang dibutuhkan secara berlanjut, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan. Dalam pelaksanaan

program kegiatan pembangunan kepariwisataan harus menjamin bahwa sumber daya dapat dipelihara dan diperbaiki (Sunaryo, 2013: 79).

Pemanfaatan sumber daya dalam Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak berdasarkan hasil penelitian meliputi pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya, sumber daya minat khusus dan sumber daya modal. Hal tersebut sejalan dengan pemaparan Pitana dan Diarta (2009: 68) yang menjelaskan bahwa sumber daya dalam pariwisata diartikan sebagai sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata. Lebih lanjut Pitana dan Diarta (2009: 69) menyampaikan bahwa sumber daya yang terkait dengan pengembangan pariwisata umumnya berupa sumber daya alam, sumber daya budaya, sumber daya manusia dan sumber daya minat khusus.

Setiap objek dan daya tarik wisata di Kepulauan Banyak memiliki keunikan dan potensi yang sangat luas untuk dikembangkan. Untuk mengetahui status, kualitas dan potensi awal dari berbagai DTW tersebut perlu dilakukan penilaian terhadap kondisi masing-masing DTW. Adapun klasifikasi dari DTW yang tercantum dalam RIPPAR Kabupaten Aceh Singkil yakni:

1. Prioritas

Daya Tarik Wisata prioritas merupakan daya tarik wisata utama, dan menjadi destinasi yang dipromosikan terlebih dahulu atau dijadikan ikon. Dalam konteks skoring, DTW prioritas adalah DTW yang memperoleh skor paling tinggi atau DTW yang sudah tercantum didalam kebijakan seperti RTRW atau RPJMD Kabupaten Aceh Singkil.

2. Unggulan

Destinasi wisata unggulan merupakan destinasi yang telah memiliki fasilitas namun secara umum belum memadai. Potensi ini juga memiliki akses namun masih sulit dijangkau. Destinasi ini dapat dijadikan sebagai wisata alternatif dan diberikan porsi promosi yang relatif lebih kecil dari DTW prioritas namun dengan anggaran pengembangan fisik yang lebih besar.

3. Potensial

Daya Tarik Wisata yang potensial adalah destinasi-destinasi yang memiliki nilai keunikan namun tidak memiliki akses dan fasilitas yang memadai atau bahkan tidak memiliki keduanya sama sekali. Untuk DTW diperlukan pembenahan fisik terlebih dahulu hingga dapat ditingkatkan masuk ke promosi.

Tabel 4.2.4.1 Sebaran objek wisata berdasarkan klasifikasi

KECAMATAN	Objek Wisata	Kelas
Pulau Banyak	Pulau Baguk	Prioritas
Pulau Banyak Barat	Pulau Tailana	Prioritas
Pulau Banyak Barat	Pulau Biawak	Prioritas
Pulau Banyak Barat	Pulau Sikandang	Prioritas
Pulau Banyak Barat	Hutan dan Gunung Tiusa	Prioritas
Pulau Banyak Barat	Ujung Lolok	Prioritas
Pulau Banyak	Pulau Palambak Besar	Prioritas

Pulau Banyak	Pulau Palambak Kecil	Prioritas
Pulau Banyak Barat	Pantai Penyu Amadangan dan Palang Ragam	Prioritas
Pulau Banyak Barat	Goa Tambego	Prioritas
Pulau Banyak Barat	Pantai Teluk Asin	Prioritas
Pulau Banyak Barat	Ujung Lakita	Prioritas
Pulau Banyak Barat	Pulau Tuangku	Unggulan
Pulau Banyak	Pulau Lambudung	Potensial
Pulau Banyak Barat	Pulau Asok	Potensial

Sumber: RIPPAR Kabupaten Aceh Singkil

1. Pulau Balai

Nama DTW : Pulau Balai

Lokasi : Kecamatan Pulau Banyak

Fasilitas :

- Gerbang Masuk : Ada
- Tempat Parkir : Ada
- Loker Retribusi : Tidak ada
- Toilet & Air Bersih : Ada
- Rumah Makan : Ada
- Penginapan : Ada
- Souvenir : Ada
- Listrik : Ada
- Kebersihan : Baik

2. Pulau Biawak

Nama DTW	: Pulau Biawak
Lokasi	: Kecamatan Pulau Banyak
Fasilitas	: - Gerbang Masuk : Tidak ada
	- Tempat Parkir : Tidak ada
	- Loker Retribusi : Tidak ada
	- Toilet & Air Bersih : Tidak ada
	- Rumah Makan : Tidak ada
	- Penginapan : Tidak ada
	- Souvenir : Tidak ada
	- Listrik : Tidak ada
	- Kebersihan : Tidak ada

3. Pulau Sikandang

Nama DTW	: Pulau Sikandang
Lokasi	: Kecamatan Pulau Banyak
Pengelola	: Belum dikelola
Fasilitas	: - Gerbang Masuk : Tidak ada
	- Tempat Parkir : Ada
	- Loker Retribusi : Tidak ada
	- Toilet & Air Bersih : Ada
	- Rumah Makan : Ada
	- Penginapan : Ada
	- Souvenir : Tidak ada

- Listrik : Ada

- Kebersihan : Ada

4. Pulau Tailana

Nama DTW : Pulau Tailana

Lokasi : Kecamatan Pulau Banyak

Fasilitas : - Gerbang Masuk : Tidak ada

- Tempat Parkir : Tidak ada

- Loker Retribusi : Tidak ada

- Toilet & Air Bersih : Ada

- Rumah Makan : Ada

- Penginapan : Ada

- Souvenir : Tidak ada

- Listrik : Ada

- Kebersihan : Ada

5. Pulau Asok

Nama DTW : Pulau Asok

Lokasi : Kecamatan Pulau Banyak

Fasilitas : - Gerbang Masuk : Tidak ada

- Tempat Parkir : Tidak ada

- Loker Retribusi : Tidak ada

- Toilet & Air Bersih : Tidak ada

- Rumah Makan : Tidak ada

- Penginapan : Tidak ada

- Souvenir : Tidak ada
- Listrik : Tidak ada
- Kebersihan : Tidak ada

6. Pulau Lambudung

- Nama DTW : Pulau Lambudung
- Lokasi : Kecamatan Pulau Banyak
- Fasilitas :
- Gerbang Masuk : Tidak ada
 - Tempat Parkir : Tidak ada
 - Loker Retribusi : Tidak ada
 - Toilet & Air Bersih : Tidak ada
 - Rumah Makan : Tidak ada
 - Penginapan : Tidak ada
 - Souvenir : Tidak ada
 - Listrik : Tidak ada
 - Kebersihan : Tidak ada

7. Pulau Tuangku

- Nama DTW : Pulau Tuangku
- Lokasi : Kecamatan Pulau Banyak Barat
- Fasilitas :
- Gerbang Masuk : Ada
 - Tempat Parkir : Ada
 - Loker Retribusi : Tidak ada
 - Toilet & Air Bersih : Ada
 - Rumah Makan : Ada

- Penginapan : Ada
- Souvenir : Tidak ada
- Listrik : Ada
- Kebersihan : Ada

8. Pulau Panjang

Nama DTW : Pulau Panjang

Lokasi : Kecamatan Pulau Banyak

- Fasilitas :
- Gerbang Masuk : Ada
 - Tempat Parkir : Tidak ada
 - Loket Retribusi : Tidak ada
 - Toilet & Air Bersih : Ada
 - Rumah Makan : Ada
 - Penginapan : Ada
 - Souvenir : Tidak ada
 - Listrik : Ada
 - Kebersihan : Ada

9. Ujung Lolok

Nama DTW : Ujung Lolok

Lokasi : Kecamatan Pulau Banyak Barat

- Fasilitas :
- Gerbang Masuk : Ada
 - Tempat Parkir : Ada
 - Loket Retribusi : Tidak ada
 - Toilet & Air Bersih : Ada

- Rumah Makan : Ada
- Penginapan : Ada
- Souvenir : Tidak ada
- Listrik : Ada
- Kebersihan : Ada

10. Hutan dan Gunung Tiusa

- Nama DTW : Hutan dan Gunung Tiusa
- Lokasi : Pulau Tuangku
- Fasilitas : - Gerbang Masuk : Tidak ada data
- Tempat Parkir : Tidak ada data
 - Loker Retribusi : Tidak ada data
 - Toilet & Air Bersih : Tidak ada data
 - Rumah Makan : Tidak ada data
 - Penginapan : Tidak ada data
 - Souvenir : Tidak ada data
 - Listrik : Tidak ada data
 - Kebersihan : Tidak ada data

11. Pantai Penyu Amadangan dan Palang Ragam

- Nama DTW : Pantai Penyu Amadangan dan Palang Ragam
- Lokasi : Pulau Bangkaru
- Fasilitas : - Gerbang Masuk : Tidak ada data
- Tempat Parkir : Tidak ada data
 - Loker Retribusi : Tidak ada data

- Toilet & Air Bersih : Tidak ada data
- Rumah Makan : Tidak ada data
- Penginapan : Tidak ada data
- Souvenir : Tidak ada data
- Listrik : Tidak ada data
- Kebersihan : Tidak ada data

12. Pantai Pasir Panjang

- Nama DTW : Pantai Pasir Panjang
- Lokasi : Pulau Tuangku
- Fasilitas :
- Gerbang Masuk : Tidak ada data
 - Tempat Parkir : Tidak ada data
 - Loker Retribusi : Tidak ada data
 - Toilet & Air Bersih : Tidak ada data
 - Rumah Makan : Tidak ada data
 - Penginapan : Tidak ada data
 - Souvenir : Tidak ada data
 - Listrik : Tidak ada data
 - Kebersihan : Tidak ada data

13. Pulau Palambak Besar

- Nama DTW : Pulau Palambak Besar
- Lokasi : Kecamatan Pulau Banyak
- Fasilitas :
- Gerbang Masuk : Ada
 - Tempat Parkir : Ada

- Loket Retribusi : Tidak ada
- Toilet & Air Bersih : Ada
- Rumah Makan : Ada
- Penginapan : Ada
- Souvenir : Tidak ada
- Listrik : Ada
- Kebersihan : Ada

14. Pulau Palambak Kecil

- Nama DTW : Pulau Palambak Kecil
- Lokasi : Kecamatan Pulau Banyak
- Fasilitas : - Gerbang Masuk : Ada
- Tempat Parkir : Ada
 - Loket Retribusi : Tidak ada
 - Toilet & Air Bersih : Ada
 - Rumah Makan : Ada
 - Penginapan : Ada
 - Souvenir : Tidak ada
 - Listrik : Ada
 - Kebersihan : Ada

15. Pulau Bangkaru

- Nama DTW : Pulau Bangkaru
- Lokasi : Kecamatan Pulau Banyak Barat
- Fasilitas : - Gerbang Masuk : Tidak ada

- Tempat Parkir : Tidak ada
- Loker Retribusi : Tidak ada
- Toilet & Air Bersih : Tidak ada
- Rumah Makan : Tidak ada
- Penginapan : Tidak ada
- Souvenir : Tidak ada
- Listrik : Tidak ada
- Kebersihan : Tidak ada

Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil secara keseluruhan hampir memenuhi prinsip pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Hal ini masih terkendala dengan adanya kawasan destinasi yang berada di desa asantola yang luput dari pengawasan sehingga menjadikan kawasan tersebut keasrian alamnya sudah tidak terjaga lagi akibat pengembangan kawasan ini memakai peralatan-peralatan yang dapat merusak lingkungan. Tidak sejalan dengan penelitian Ardianto (2016: 70) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber daya di Kabupaten Natuna cukup baik dimana pemerintah memanfaatkan sumber daya alam yang tidak berlebihan serta pembangunan sektor wisata dianggap tidak merusak lingkungan dan keindahan alam yang tercipta.

4.2.5 Adanya Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara pengunjung, pelaku usaha, dan masyarakat setempat terwujud

dengan baik mulai dari tahapan perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran (Sunaryo, 2013: 79). Berdasarkan pemaparan tersebut maka tercapainya prinsip mengakomodasikan aspirasi masyarakat dapat dinilai dari ada atau tidaknya upaya untuk menampung, menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan prinsip tersebut, pada Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak sudah terdapat upaya dalam menampung, menyalurkan, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pengelola BUMDES, pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah. Beberapa pihak swasta belum terlibat aktif dalam kegiatan tersebut dikarenakan kerjasama yang terjalin masih bersifat umum dan masih berdiri sendiri-sendiri diluar kemitraan yang dilakukan. Sejalan dengan penelitian Ardianto (2016: 71) yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna juga telah merekomendasikan aspirasi masyarakat guna mendukung pengembangan pariwisata.

Prinsip mengakomodasikan aspirasi masyarakat meskipun telah diterapkan namun masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat untuk ikut terlibat dalam menyampaikan aspirasinya pada aktor pembuat kebijakan mengakibatkan hanya anggota masyarakat tertentu saja yang bisa menyampaikannya. Disamping itu masih rendahnya keaktifan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

4.2.6 Adanya Daya Dukung Lingkungan

Sunaryo (2013: 79) menyampaikan bahwa pertimbangan utama yang harus dijadikan dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotik, sosial-ekonomi, dan budaya. Sunaryo (2013: 79) juga menjelaskan bahwa pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada.

Prinsip daya dukung lingkungan pada Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya kawasan pariwisata yang berada di pulau-pulau kecil yang dijadikan sebagai kawasan privasi dan fasilitas pariwisatanya tidak sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berkunjung di kawasan tersebut. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Ardianto (2016: 72) yang menyatakan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna telah menerapkan pembangunan sektor pariwisata sesuai dan serasi dengan kapasitas yang dimiliki, meliputi kondisi lingkungan yang cukup aman didatangi, serta keberadaan budaya lokal yang cukup menarik.

4.2.7 Adanya Akuntabilitas Lingkungan

Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat setempat yang tercermin dengan jelas dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan

kepariwisataan yang ada. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam seperti tanah, air dan udara harus menjamin akuntabilitas kinerja yang tinggi serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan (Sunaryo, 2013: 80).

Berdasarkan Renstra DISPARPORA Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan bahwa Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memberikan informasi tentang sanitasi dan air bersih, keberlangsungan sumber daya alam yang ramah dan tidak menimbulkan musibah. KLHS memiliki potensi penting dalam perencanaan pembangunan, apabila perencanaan pembangunan tidak memperhatikan KLHS maka dapat dipastikan akan memberikan dampak yang negatif dikemudian hari seperti bencana dan kelangkaan sumber daya. Sehingga KLHS menjadi dokumen pengendalian terhadap program/kegiatan yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Adapun pembangunan dan pengembangan pariwisata Aceh Singkil dilakukan dengan mamakai prinsip pembangunan berwawasan lingkungan serta merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Oleh karena itu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil memegang prinsip bahwa lingkungan yang lestari merupakan salah satu sasaran pengembangan pariwisata.

Pencapaian prinsip ini secara keseluruhan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan dalam kaitannya dengan poin kebermanfaatan bagi kualitas

manusia dan lingkungan masyarakat, khususnya menyangkut kebermanfaatan sosial dan ekonomi yang masih belum mampu memberikan pengaruh yang besar dan luas untuk masyarakat sekitar. Hal ini senada dengan penelitian Isna dan Rahayu (2018: 557) menyatakan bahwa penyelenggaraan kampung wisata masih belum mampu memberikan pengaruh yang besar dan luas, hal ini terhambat disebabkan oleh belum adanya pondasi yang kokoh dan jaringan yang luas dalam penyelenggaraan kampung wisata, sehingga aktifitas pariwisata yang dilakukan masih sangat minim dan masyarakat yang terlibat juga masih terbatas masyarakat tertentu.

4.2.8 Adanya Pelatihan Pada Masyarakat Terkait

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat secara *vocational* dan *professional*. Topik-topik pelatihan sebaiknya diarahkan dengan wawasan keberlanjutan pembangunan kepariwisataan. Prinsip pelatihan pada masyarakat terkait dalam *Good Tourism Governance* dapat diukur dengan melihat ada atau tidanya program pendidikan dan pelatihan masyarakat terkait (Sunaryo, 2013: 80).

Secara keseluruhan prinsip pelatihan pada masyarakat terkait telah terlihat dari adanya berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini merujuk pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil. Berbeda dengan hasil penelitian Ardianto (2016: 74) menyatakan bahwa pemerintah daerah

dalam hal ini merujuk pada Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna belum menerapkan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat terkait, pelatihan kepariwisataan hanya diberikan kepada pegawai Dinas Pariwisata dalam bentuk seminar ataupun *workshop*.

Adapun program pelatihan yang diselenggarakan meliputi pelatihan *Tour Guide*, pelatihan layanan penginapan, transportasi dan rumah makan. Walaupun dalam prakteknya masih terdapat beberapa kendala meliputi: lokasi penelitian yang jauh dan bukan di kepulauan banyak itu sendiri, tidak adanya indikator penilaian hasil capaian program di masyarakat, hingga masalah terkait kegiatan yang belum dilakukan secara berkala berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil sudah menerapkan prinsip *Good Tourism Governance*, namun penerapannya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan ketercapaian masing-masing prinsip dalam *Good Tourism Governance* belum terpenuhi secara keseluruhan. Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak diukur berdasarkan prinsip *Good Tourism Governance* meliputi, partisipasi masyarakat terkait, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, kemitraan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya secara berlanjutan, mengakomodasikan aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, akuntabilitas lingkungan dan pelatihan pada masyarakat terkait yang masing-masing dari prinsip tersebut belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan beberapa faktor yang menghambat penerapannya. Faktor tersebut meliputi keaktifan dan sinergitas pemangku kepentingan belum sepenuhnya terwujud, hanya masyarakat tertentu yang aktif dan berpartisipasi, program pelatihan masih belum berkelanjutan, manfaat kegiatan pariwisata belum dirasakan secara luas dan belum mampu mendorong kepemilikan lokal serta pedoman *monitoring* dan evaluasi masih sederhana tanpa ada indikator khusus guna mengukur dampak dari kegiatan wisata yang dilakukan. Adapun pengoptimalan penerapan prinsip *Good Tourism Governance* tersebut menjadi penting apabila Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil dijadikan alternatif wisata yang unggul dan berdaya saing.

5.2 Saran

1. Masyarakat hendaknya diberikan informasi yang jelas terkait visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara keseluruhan dalam pembangunan kepariwisataan.
2. Pemerintah daerah perlu mengkoordinir guna menyatukan aktor-aktor pelaku wisata yang belum bersinergi.
3. Kemitraan dengan pihak swasta perlu ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
4. Masyarakat hendaknya lebih aktif lagi menyuarakan aspirasinya, kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam mengembangkan pariwisata perlu ditingkatkan.
5. Mengaktifkan komunitas-komunitas yang dirasa perlu untuk mengembangkan pariwisata agar adanya produktifitas dalam pengembangan pariwisata.
6. Penguatan Organisasi Kepariwisata
7. Pembangunan SDM Pariwisata
8. Memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah
9. Penguatan struktur industri pariwisata
10. Peningkatan daya saing produk pariwisata
11. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata
12. Penciptaan kredibilitas bisnis
13. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administarasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahayu, Amy Y.S dan Juwono, Vishnu. 2019. *Birokrasi & Governance Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Teguh, Frans. 2015. *Tata Kelola Destinasi Membangun Ekosistem Pariwisata*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Judisseno, Rimsy K. 2017. *Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisataan Mengkaji Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Pitana, I Gde dan Diarta, I Ketut Surya. 2020. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Yoeti, Oka A. 1982. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Grava Media.
- Moleong, Lexy J. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdyakarya.
- Suwena, I Ketut dan Widyatmaja, I Gusti. 2017. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Bali: Pustaka Lasaran.
- Antariksa, Basuki. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Pengembangan Kepariwisataan Berkelanjutan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual*. Malang: Intrans Publising.
- Prasiasa, Putu Oka (2012). *Destinasi pariwisata, berbasis masyarakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Inskeep, E. 1991. *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach*. Canada: Wiley.
- Jubaedah, E., Dawud, J., Mulyadi, D., et al. 2008. *Model Pengukuran Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: PKP2A I-LAN

Hasil Penelitian

- Kurniawan, Teguh. 2007. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Perilaku Model Klasik dan NPM ke Good Governance. *Jurnal. JIANA Jurnal Administrasi Negara*. Volume 7, 1 Januari 2007. Halaman 52-70.
- Ardianto. 2016. *Peran Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kabupaten Natuna*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Isna KH dan Sugi Rahayu. 2018. *Good Tourism Governance dalam Pengelolaan Kampung Wisata di Kawasan Kotagede Kota Yogyakarta*.

Sumber Lain:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS)

World Tourism Organization. 2001. A Partical Guide To Tourism Destination Managemen

Rencanan Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPAR) Kabupaten Aceh Singkil

Rencana Strategi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021

Dokumentasi dengan Narasumber



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : EKO FIRDAUS
Tempat/TglLahir : Singkil, 27 Juni 1996
NPM : 1603100078
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Singkil
Anakke : 1

Nama Orang Tua

Ayah : Iswandi
Ibu : Ermita
Alamat : Singkil

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 1 Pasar Singkil, (2002-2007)
2. MTSN 1 Singkil, (2007-2010)
3. MAN 1 Singkil, (2010-2013)
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Dengan demikian riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Juli 2021

EKO FIRDAUS

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul : Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil

a. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Nama : Drs. Syamla

Umur : 50 Tahun

Jabatan : Sekretaris

1. Adanya Partisipasi Masyarakat Terkait

- a. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak?

Jawab: Sebagaimana yang kita pahami bahwa dalam setiap usaha dan program yang dilakukan oleh pemerintah ini secara otomatis masyarakat pasti diikuti sertakan artinya sebagai fungsi controlling karena yang menjadi aktor yang sesungguhnya dalam pembangunan pariwisata adalah masyarakat. Jadi bersinergi sekali ketika pemerintah mengajak kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat memang harus di upayakan agar bisa mengawal program pembangunan ini.

- b. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan serta mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan

dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata kepulauan banyak?

Jawab: Sejauh ini upaya pemerintah dalam mengajak dan mengundang stakeholder dalam merumuskan visi, misi dan tujuan serta menginformasikan dan mensosialisasikan wilayah atau kawasan apa saja yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan dalam pengelolaan daya tarik wisata.

- c. Apakah masyarakat juga diberikan ruang dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya?

Jawab: Sebenarnya sudah melalui cara pelatihan-pelatihan seperti pemandu wisata, ekonomi kreatif dan lain-lain, cuma kita terkendala dengan kelanjutannya.

2. Adanya Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

- a. Apakah ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Jelas mereka terlibat, karena mereka mempunyai peran dalam proses membangun pariwisata

- b. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Untuk di daerah kita sendiri keterlibatan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Gerakan Pencinta Alam Indonesia (GENPI) dan lain-lain.

- c. Apakah keterlibatan pemangku kepentingan terlibat aktif dan produktif dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Sepertinya belum terlihat aktif dan produktif

3. Adanya Kemitraan Kepemilikan Lokal

- a. Apakah pembangunan pariwisata kepulauan banyak mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas kepada masyarakat setempat?

Jawab: Pada prinsipnya pemerintah menginginkan seperti itu, bahwa pembangunan pariwisata kepulauan banyak ini juga menghidupkan kreatifitas masyarakat. Kalau kita lihat sekarang justru seperti Home Stay, Penginapan seperti yang kita lihat di beberapa pulau-pulau masih banyak di kelola oleh orang-orang dari luar, karena mungkin terkendala dengan dana. Seperti di pulau panjang sendiri ada bumdes, tetapi sejauh ini kita melihat bahwa sedikit agak menurun, justru orang yang punya banyak dana orang dari luar. Terkait hal ini masyarakat juga diberikan peluang, cuma mungkin sepertinya masyarakat belum diberikan secara maksimal tentang pengelolaan pariwisata, karena sifatnya hanya pelatihan-pelatihan yang sederhana.

- b. Apakah usaha fasilitas penunjang pariwisata kepulauan banyak sudah dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat melalui model kemitraan yang sinergis?

Jawab: Ya.

- c. Bagaimana keterkaitan antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat setempat dalam menunjang kepemilikan lokal dari berbagai usaha pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Sebenarnya kerjasama contohnya dalam bidang transportasi, penginapan, rumah makan dan lain-lain.

4. Adanya Pemanfaatan Sumber Daya Berlanjut

- a. Apakah pembangunan kepariwisataan menggunakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan?

Jawab: Kalau kita mengamati bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini pada prinsipnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

- b. Apa langkah pemerintah dalam membangun pariwisata kepulauan banyak dengan memanfaatkan sumber secara berlanjut?

Jawab: Langkah pemerintah melakukan beberapa indentifikasi, dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada.

- c. Apakah pemerintah menjamin bahwa sumber daya dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku?

Jawab: Saya pikir kita tidak bisa menjamin, karena tahapannya masih dalam perencanaan.

5. Adanya Mengakomodasikan Masyarakat

- a. Apakah aspirasi dan tujuan masyarakat setempat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan?

Jawab: Sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa kelompok masyarakat yang sudah datang untuk melakukan dan menyampaikan usulan pembangunan pariwisata yang dikelola oleh masyarakat.

- b. Bagaimana keharmonisan antara pengunjung, pelaku usaha dan masyarakat setempat dalam kegiatan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Terkait dengan keharmonisan sejauh ini yang kita lihat sifatnya relatif.

- c. Apakah perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran sudah mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam pengembangan atraksi wisata?

Jawab: Tentu dalam tahapan perencanaan, manajemen sampai pada pemasaran kita sudah berupaya untuk mengakomodasikannya, tetapi belum secara maksimal.

6. Adanya Daya Dukung Lingkungan

- a. Apa pertimbangan utama daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan?

Jawab: Agama, sosial, budaya dan lain-lain menjadi pertimbangan utama dalam mengembangkan fasilitas dan kegiatan kepariwisataan.

- b. Apakah pembangunan dan pengembangan sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada?

Jawab: Tidak sepenuhnya karena ada beberapa kawasan yang memang secara privasi dan tentu jauh dari pemukiman penduduk dan letaknya

pun di pulau-pulau kecil yang ada fasilitas seperti bar beach dan lain-lain.

- c. Apa skala dan tipe fasilitas wisata yang diupayakan supaya tidak melampaui batas ambang penggunaan yang dapat ditoleransi?

Jawab: Merujuk pada RIPPDA Provinsi Aceh ditetapkan tipe dan skalanya adalah Wisata Halal

7. Adanya Akuntabilitas Lingkungan

- a. Apakah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pariwisata kepulauan banyak telah memperhatikan akuntabilitas lingkungan yang ada?

Jawab: Ya

- b. Apakah bisa dipastikan dalam kebijakan, program dan strategi pembangunannya dari sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan? Ya, dalam kebijakan program dan strategi pembangunannya kita selalu mengikuti aturan yang berlaku.

Jawab: Pasti kita selalu merujuk pada aturan yang telah berlaku.

- c. Bagaimana proses kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak dilakukan?

Jawab: Yang jelas proses kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan terus memperhatikan dampak kepada masyarakat setempat agar bisa mendapatkan pekerjaan guna untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.

8. Adanya Pelatihan Masyarakat Terkait

- a. Apakah dalam pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak secara berlanjut telah melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara *vocational* dan *professional*?

Jawab: Ya, tentu hal ini hampir setiap tahun kita laksanakan.

- b. Apa saja bentuk dari topik-topik pelatihan yang diarahkan dalam pembangunan kepariwisataan yang berlanjut?

Jawab: Pelatihan pelayanan Home Stay, Akomodasi dan terakhir ini kita laksanakan pelatihan *tour guide*.

- c. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat terkait?

Jawab: Kita terkendala dengan kelanjutan dari pelatihan itu sendiri. Untuk faktor pendukung yang jelas masyarakat sangat antusias ikut serta dalam kegiatan pelatihan yang kita laksanakan.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul : Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil

b. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Nama : Surkani, SE

Umur : 46 Tahun

Jabatan : Kepala Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Adanya Partisipasi Masyarakat Terkait

- a. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak?

Jawab: Yang jelas dalam pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak pemerintah kabupaten aceh singkil selalu melibatkan masyarakat setempat dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan pariwisata dalam rangka kemajuan kepariwisataan di aceh singkil. Jadi tidak bisa berdiri sendiri saja dalam menentukan kebijakan pembangunan di kepulauan banyak.

- b. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan serta mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata kepulauan banyak?

Jawab: Ini dapat kita lihat kita lihat dari setiap musrenbang yang ada di desa, kecamatan maupun kabupaten, kita selalu mengundang komponen masyarakat. Artinya partisipasi yang diberikan pemerintah seluas-luasnya untuk mengusulkan kebutuhannya dalam pengembangan pariwisata baik dari segi fisik maupun sumber daya manusia. Jadi tidak serta merta pemerintah menentukan keinginannya saja.

- c. Apakah masyarakat juga diberikan ruang dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya?

Jawab: Jelas masyarakat diberikan ruang dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah direncanakan.

2. Adanya Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

- a. Apakah ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Ya pastilah artinya, peran pemangku kepentingan itu juga kita harapkan untuk bersinergi dalam pembangunan.

- b. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Pemerintah Daerah, kelompok sadar wisata (POKDARWIS), BUMDES, Asosiasi Pelaku Wisata, semacam komunitas *guide*, komunitas penginapan dan segala macam *tour and tavel*, itu semua punya peran untuk bekerjasama dalam membangun kepariwisataan di kepulauan banyak.

- c. Apakah keterlibatan pemangku kepentingan terlibat aktif dan produktif dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Sejauh ini menurut saya aktif dan produktif, meskipun masih belum terlihat secara maksimal.

3. Adanya Kemitraan Kepemilikan Lokal

- a. Apakah pembangunan pariwisata kepulauan banyak mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas kepada masyarakat setempat?

Jawab: Jelas, artinya pembangunan yang selama ini kita lakukan semuanya melibatkan masyarakat, contohnya pembangunan BUMDES dan desa wisata yang ada di pulau balai ini semuanya yang bekerja itu masyarakat, yang menikmati masyarakat.

- b. Apakah usaha fasilitas penunjang pariwisata kepulauan banyak sudah dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat melalui model kemitraan yang sinergis?

Jawab: Ya, bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah itu sepenuhnya pengelolaan diserahkan untuk masyarakat setempat melalui Kelompok Sadar Wisata, BUMDES semuanya kita serahkan.

- c. Bagaimana keterkaitan antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat setempat dalam menunjang kepemilikan lokal dari berbagai usaha pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Yang jelas kerjasama.

4. Adanya Pemanfaatan Sumber Daya Berlanjut

- a. Apakah pembangunan kepariwisataan menggunakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan?

Jawab: Pengembangan pariwisata di kepulauan banyak semuanya harus memperhatikan dampak lingkungan karena kepulauan banyak itu berada pada taman wisata alam dan wilayah konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui BKSDA. Artinya seluruh aktifitas pariwisata di kepulauan banyak itu harus memperhatikan masalah dampak lingkungan.

- b. Apa langkah pemerintah dalam membangun pariwisata kepulauan banyak dengan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan?

Jawab: Semuanya diatur agar demi keberlanjutan pariwisata, bahkan di pulau-pulau kecil kalau ada pembangunan resort atau penginapan tidak dibenarkan memakai material yang tidak ramah lingkungan seperti besi, semen dan lain-lain demi terjaganya ekosistem dari sumber daya yang ada.

- c. Apakah pemerintah menjamin bahwa sumber daya dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku?

Jawab: Kalau kita menjamin 100% tidak, kita selaku pemerintah tetap mengedepankan semuanya harus dengan aturan-aturan yang berlaku, tetapi dalam pengimplementasiannya dilapangan ada terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan beberapa oknum yang kita tidak bisa kontrol sepenuhnya.

5. Adanya Mengakomodasikan Masyarakat

- a. Apakah aspirasi dan tujuan masyarakat setempat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan?

Jawab: Tentu dalam program kegiatan kepariwisataan kepulauan banyak kita sudah berupaya akomodasikan aspirasi dan tujuan masyarakat setempat, hal ini dapat kita lihat dalam hasil Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Aceh Singkil yang secara keseluruhan dari aspirasi masyarakat.

- b. Bagaimana keharmonisan antara pengunjung, pelaku usaha dan masyarakat setempat dalam kegiatan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Dari beberapa survey yang kita lakukan bahwa keharmonisan antara pengunjung, pelaku usaha dan masyarakat sangat harmonis dalam kegiatan pariwisata kepulauan banyak.

- c. Apakah perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran sudah mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam pengembangan atraksi wisata?

Jawab: Ya, dengan menyelenggarakan Festival Pulau Banyak Internasional.

6. Adanya Daya Dukung Lingkungan

- a. Apa pertimbangan utama daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan?

Jawab: Yang jelas karena kepulauan banyak berada pada kawasan taman wisata alam maka kita memperhatikan komponen lingkungan hidup yang berada di sekitar kawasan tersebut. Kemudian faktor sosial dan budaya juga menjadi pertimbangan dalam kegiatan kepariwisataan.

- b. Apakah pembangunan dan pengembangan sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada?

Jawab: Sejauh ini kita melihat sesuai dan serasi, meskipun ada beberapa kawasan pulau-pulau kecil yang sifatnya privasi.

- c. Apa skala dan tipe fasilitas wisata yang diupayakan supaya tidak melampaui batas ambang penggunaan yang dapat ditoleransi?

Jawab: Karena kita berada di Provinsi Aceh yang kuat dengan hukum syari'ah, jadi skala dan tipe fasilitas wisata kita adalah wisata halal.

7. Adanya Akuntabilitas Lingkungan

- a. Apakah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pariwisata kepulauan banyak telah memperhatikan akuntabilitas lingkungan yang ada?

Jawab: Tentu, kita memperhatikan lingkungan yang ada. Contohnya seperti kita sudah membangun tempat pembuangan akhir sampah melalui dinas lingkungan hidup untuk menampung sampah-sampah yang berada di pulau-pulau kecil. Kemudian dari dinas DKP sendiri sudah melakukan sosialisasi dan melarang pengambilan terumbu karang dan biota-biota yang berada di kepulauan banyak.

- b. Apakah bisa dipastikan dalam kebijakan, program dan strategi pembangunannya dari sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan?

Jawab: Ya

- c. Bagaimana proses kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak dilakukan?

Jawab: Kebijakan, program dan strateginya kita selalu berupaya untuk mensejahterakan masyarakat setempat.

8. Adanya Pelatihan Masyarakat Terkait

- a. Apakah dalam pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak secara berlanjut telah melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara *vocational* dan *professional*?

Jawab: Ya hampir tiap tahun kita laksanakan gunanya untuk meningkatkan standar pelayanan dalam kegiatan kepariwisataan.

- b. Apa saja bentuk dari topik-topik pelatihan yang diarahkan dalam pembangunan kepariwisataan yang berlanjut?

Jawab: Pelatihan home stay, *tour guide*, konsumsi dan akomodasi, pelatihan dasar selam.

- c. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat terkait?

Jawab: Sangat antusiasnya masyarakat terkait dengan pelatihan yang kita laksanakan.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul : Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil

c. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil

Nama : Satiman, SE

Umur : 42 Tahun

Jabatan : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

1. Adanya Partisipasi Masyarakat Terkait

- a. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak?

Jawab: Seiring dengan perkembangan kepariwisataan kepulauan banyak tentu kita melibatkan masyarakat karena peran serta masyarakat ini sangat penting untuk mengawasi dan mengontrol setiap gerak pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak.

- b. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan serta mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata kepulauan banyak?

Jawab: Sejauh ini bentuk partisipasi masyarakat kita berikan dengan diadakannya musrenbang setiap tahunnya.

- c. Apakah masyarakat juga diberikan ruang dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya?

Jawab: Jelas, karena tidak serta merta pemerintah mengambil alih secara keseluruhan dalam merealisasikan rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya.

2. Adanya Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

- a. Apakah ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Jelas ada, karena tanpa adanya pemangku kepentingan dan stake holder yang terkait, pariwisata tidak akan mengalami kemajuan.

- b. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Dalam hal ini bahwa keterlibatan Pemerintah Daerah, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Gerakan Pesona Indonesia (GENPI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) telah terlibat dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak.

- c. Apakah keterlibatan pemangku kepentingan terlibat aktif dan produktif dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Sejauh ini mereka sangat aktif dan produktif.

3. Adanya Kemitraan Kepemilikan Lokal

- a. Apakah pembangunan pariwisata kepulauan banyak mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas kepada masyarakat setempat?

Jawab: Seiring dengan berkembangnya pariwisata kepulauan banyak tentunya membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, melalui dibentuknya BUMDES dan usaha penunjang fasilitas penunjang pariwisata yang secara otomatis membutuhkan tenaga kerja.

- b. Apakah usaha fasilitas penunjang pariwisata kepulauan banyak sudah dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat melalui model kemitraan yang sinergis?

Jawab: Sudah berjalan kurang lebih 5 tahun yang lalu.

- c. Bagaimana keterkaitan antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat setempat dalam menunjang kepemilikan lokal dari berbagai usaha pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Sejauh ini yang kami perhatikan mereka bekerjasama dalam mengembangkan pariwisata kepulauan banyak.

4. Adanya Pemanfaatan Sumber Daya Berlanjut

- a. Apakah pembangunan kepariwisataan menggunakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan?

Jawab: Ya tentu.

- b. Apa langkah pemerintah dalam membangun pariwisata kepulauan banyak dengan memanfaatkan sumber secara berlanjut?

Jawab: Untuk langkah selanjutnya, tentu kita untuk mengembangkan pariwisata kepulauan banyak dengan tetap menjaga kelestarian alam

dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keberlanjutan pariwisata.

- c. Apakah pemerintah menjamin bahwa sumber daya dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku?

Jawab: Ya.

5. Adanya Mengakomodasikan Masyarakat

- a. Apakah aspirasi dan tujuan masyarakat setempat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan?

Jawab: Tentu aspirasi dan tujuan masyarakat kita akomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan.

- b. Bagaimana keharmonisan antara pengunjung, pelaku usaha dan masyarakat setempat dalam kegiatan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Sangat harmonis dan saling berinteraksi satu sama lain.

- c. Apakah perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran sudah mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam pengembangan atraksi wisata?

Jawab: Ya.

6. Adanya Daya Dukung Lingkungan

- a. Apa pertimbangan utama daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan?

Jawab: Yang menjadi pertimbangan utama kita adalah kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

- b. Apakah pembangunan dan pengembangan sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada?

Jawab: Ya, itu kita laksanakan dengan cara tidak melebihi kapasitas-kapasitas lokal yang ada di kepulauan banyak.

- c. Apa skala dan tipe fasilitas wisata yang diupayakan supaya tidak melampaui batas ambang penggunaan yang dapat ditoleransi?

Jawab: Tentunya dalam pengembangan pariwisata, siapa saja yang akan mengembangkannya selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengembangan tersebut. Terkait dengan tipe dan fasilitas pariwisata kita adalah wisata halal.

7. Adanya Akuntabilitas Lingkungan

- a. Apakah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pariwisata kepulauan banyak telah memperhatikan akuntabilitas lingkungan yang ada?

Jawab: Alhamdulillah masyarakat sudah paham dan tau pentingnya lingkungan dalam keberlanjutan pariwisata. Tentu hal ini pemerintah tidak henti-hentinya menghimbau segenap pemangku kepentingan yang ada agar tetap memperhatikan lingkungan dan tetap menjaganya.

- b. Apakah bisa dipastikan dalam kebijakan, program dan strategi pembangunannya dari sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan?

Jawab: Kita selalu berupaya dan berusaha untuk mencegah agar pembangunan pariwisata di kepulauan banyak tidak di eksploitasi secara berlebihan, karena kepulauan banyak ini adalah kawan Taman Wisata Alam (TWA).

- c. Bagaimana proses kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak dilakukan?

Jawab: Sebagaimana yang kita ketahui pemerintah daerah selalu berusaha dalam kebijakan, program dan strateginya menyentuh untuk masyarakat baik melalui dana APBD, APBA dan tidak tertutup kemungkinan juga dari pemerintah pusat.

8. Adanya Pelatihan Masyarakat Terkait

- a. Apakah dalam pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak secara berlanjut telah melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara *vocational* dan *professional*?

Jawab: Sudah, setiap tahun kita laksanakan

- b. Apa saja bentuk dari topik-topik pelatihan yang diarahkan dalam pembangunan kepariwisataan yang berlanjut?

Jawab: Seperti pelatihan *tour guide*, home stay, promosi dan lain lain.

c. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat terkait?

Jawab: Saya kira faktor penghambatnya tidak ada. Adapun faktor pendukungnya adalah masyarakat sangat antusias dengan adanya pelatihan semacam ini karena bisa membekali masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di kepulauan banyak.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul : Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil

d. Pelaku Usaha

Nama : Mirzal

Umur : 42 Tahun

1. Adanya Partisipasi Masyarakat Terkait

- a. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak?

Jawab: Tidak sepenuhnya.

- b. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan serta mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata kepulauan banyak?

Jawab: Dalam proses menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan saya sendiri tidak mengetahui informasi secara pasti kapan direncanakan dan ditetapkannya secara khusus.

- c. Apakah masyarakat juga diberikan ruang dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya?

Jawab: Tidak sepenuhnya, karena dalam proses menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan di kepulauan banyak ini masyarakat sendiri tidak mengetahui secara jelas.

2. Adanya Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

- a. Apakah ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Ya.

- b. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Setau saya pemerintah daerah, BUMDES, pokdarwis dan genpi. Kalau seperti Asosiasi Bisnis, Asosiasi Industri Wisata itu tidak ada. Kalaupun ada saya belum menerima informasi mengenai adanya wadah ini.

- c. Apakah keterlibatan pemangku kepentingan terlibat aktif dan produktif dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Sejauh ini terlihat aktif, kalau produktivitasnya belum terlihat maksimal.

3. Adanya Kemitraan Kepemilikan Lokal

- a. Apakah pembangunan pariwisata kepulauan banyak mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas kepada masyarakat setempat?

Jawab: Belum sepenuhnya mampu. Karena masih minimnya fasilitas-fasilitas yang dibangun, hal ini menyebabkan bahwa tidak terbuka luasnya lapangan pekerjaan.

- b. Apakah usaha fasilitas penunjang pariwisata kepulauan banyak sudah dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat melalui model kemitraan yang sinergis?

Jawab: Pada prinsipnya kerjasama antara pelaku usaha penginapan, home stay, rumah makan dan transportasi.

- c. Bagaimana keterkaitan antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat setempat dalam menunjang kepemilikan lokal dari berbagai usaha pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Sejauh ini saya perhatikan sangat terkait, meskipun ada beberapa pelaku usaha yang dari luar yang tidak acuh.

4. Adanya Pemanfaatan Sumber Daya Berlanjut

- a. Apakah pembangunan kepariwisataan menggunakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan?

Jawab: Ya

- b. Apa langkah pemerintah dalam membangun pariwisata kepulauan banyak dengan memanfaatkan sumber secara berlanjut?

Jawab: Yang kami ketahui bahwa sejauh ini langkah pemerintah mengatur penggunaan material-material yang dinilai akan merusak ekosistem yang berada di kawasan destinasi dengan cara

mensosialisasikan apa-apa saja yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

- c. Apakah pemerintah menjamin bahwa sumber daya dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku?

Jawab: Dalam hal ini kami sebagai pelaku usaha selalu berkoordinasi dengan pemerintah terkait dengan saja yang hendak dikembangkan. Jika pemerintah memberi izin berarti pemerintah sudah menjamin bahwa sudah menerapkan standar dan kriteria yang sudah diatur.

5. Adanya Mengakomodasikan Masyarakat

- a. Apakah aspirasi dan tujuan masyarakat setempat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan?

Jawab: Sejauh ini sudah diakomodasikan, tetapi belum sepenuhnya terealisasikan.

- b. Bagaimana keharmonisan antara pengunjung, pelaku usaha dan masyarakat setempat dalam kegiatan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Sangat harmonis, karena masyarakat setempat welcome terhadap aktivitas pariwisata yang dilakukan wisatawan selagi tidak melanggar norma-norma yang berlaku.

- c. Apakah perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran sudah mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam pengembangan atraksi wisata?

Jawab: Belum sepenuhnya.

6. Adanya Daya Dukung Lingkungan

- a. Apa pertimbangan utama daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan?

Jawab: Sosial, ekonomi dan budaya

- b. Apakah pembangunan dan pengembangan sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada?

Jawab: Saya rasa tidak sepenuhnya sesuai dan serasi karena ada beberapa wilayah yang dijadikan kawasan yang sifatnya privasi, justru karena itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengunjunginya.

- c. Apa skala dan tipe fasilitas wisata yang diupayakan supaya tidak melampaui batas ambang penggunaan yang dapat ditoleransi?

Jawab: Wisata Halal

7. Adanya Akuntabilitas Lingkungan

- a. Apakah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pariwisata kepulauan banyak telah memperhatikan akuntabilitas lingkungan yang ada?

Jawab: Ya

- b. Apakah bisa dipastikan dalam kebijakan, program dan strategi pembangunannya dari sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan?

Jawab: Tidak tau

- c. Bagaimana proses kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak dilakukan?

Jawab: Kami dari pelaku usaha sendiri tidak tau pasti seperti apa kebijakan, program dan strategi pembangunan yang ditetapkan.

8. Adanya Pelatihan Masyarakat Terkait

- a. Apakah dalam pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak secara berlanjut telah melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara *vocational* dan *professional*?

Jawab: Ya, saya pernah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA).

- b. Apa saja bentuk dari topik-topik pelatihan yang diarahkan dalam pembangunan kepariwisataan yang berlanjut?

Jawab: Seperti pelatihan *tour gouide*, pelayanan hotel dan penginapan, transportasi dan lain lain.

- c. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat terkait?

Jawab: Faktor pendukungnya masyarakat sangat antusias dengan adanya pelatihan ini, sebab masyarakat juga ingin membekali pengetahuan mereka terhadap pelayanan yang maksimal terhadap aktivitas pariwisata. Tapi yang menjadi faktor penghambatnya, lokasi pelatihan yang sangat jauh dari kecamatan pulau banyak itu sendiri.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul : Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil

e. Pelaku Usaha

Nama : Wandu

Umur : 41 Tahun

1. Adanya Partisipasi Masyarakat Terkait

- a. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak?

Jawab: Sejauh ini pemerintah belum sepenuhnya memberikan ruang pada masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol pembangunan pariwisata di kepulauan banyak, karena tidak adanya informasi yang jelas tentang apa-apa saja yang program pemerintah dan apa-apa saja yang akan dibangun.

- b. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan serta mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata kepulauan banyak?

Jawab: Untuk visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak kami tidak tau secara pasti.

- c. Apakah masyarakat juga diberikan ruang dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya?

Jawab: Kami tidak mengetahui secara pasti rencana dan program yang telah disusun sebelumnya karena tidak adanya informasi tentang ini.

2. Adanya Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

- a. Apakah ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Ya, ada.

- b. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Seperti yang kami ketahui pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak adalah pemerintah daerah, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), GENPI, BUMDES dan lain-lain.

- c. Apakah keterlibatan pemangku kepentingan terlibat aktif dan produktif dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Mereka cukup aktif dalam hal ini tetapi belum sepenuhnya produktif.

3. Adanya Kemitraan Kepemilikan Lokal

- a. Apakah pembangunan pariwisata kepulauan banyak mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas kepada masyarakat setempat?

Jawab: Ya.

- b. Apakah usaha fasilitas penunjang pariwisata kepulauan banyak sudah dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat melalui model kemitraan yang sinergis?

Jawab: Ya, itu sudah dilakukan sejak lama.

- c. Bagaimana keterkaitan antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat setempat dalam menunjang kepemilikan lokal dari berbagai usaha pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Dalam hal ini saya sebagai pelaku usaha sangat terkait dengan masyarakat setempat dalam menyediakan transportasi dan konsumsi.

4. Adanya Pemanfaatan Sumber Daya Berlanjut

- a. Apakah pembangunan kepariwisataan menggunakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan?

Jawab: Ya

- b. Apa langkah pemerintah dalam membangun pariwisata kepulauan banyak dengan memanfaatkan sumber secara berlanjut?

Jawab: Pemerintah mengatur penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan dalam pengembangan pariwisata.

- c. Apakah pemerintah menjamin bahwa sumber daya dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku?

Jawab: Tidak tau.

5. Adanya Mengakomodasikan Masyarakat

- a. Apakah aspirasi dan tujuan masyarakat setempat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan?

Jawab: Ya, sejauh ini pemerintah mengakomodasikan seluruh program dan kegiatan yang diusulkan.

- b. Bagaimana keharmonisan antara pengunjung, pelaku usaha dan masyarakat setempat dalam kegiatan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Sangat harmonis.

- c. Apakah perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran sudah mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam pengembangan atraksi wisata?

Jawab: Belum terlihat secara jelas.

6. Adanya Daya Dukung Lingkungan

- a. Apa pertimbangan utama daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan?

Jawab: Sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengembangkan fasilitas dan kegiatan kepariwisataan. Karena dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas mampu mengarahkan pembangunan pariwisata kepulauan banyak ke arah yang positif. Baik dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

- b. Apakah pembangunan dan pengembangan sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada?

Jawab: Belum sepenuhnya serasi dan sesuai, karena masih ada fasilitas-fasilitas pariwisata di beberapa pulau yang tidak sesuai dengan kehidupan lokal masyarakat setempat seperti adanya bar beach dan lain-lain.

- c. Apa skala dan tipe fasilitas wisata yang diupayakan supaya tidak melampaui batas ambang penggunaan yang dapat ditoleransi?

Jawab: Wisata Halal

7. Adanya Akuntabilitas Lingkungan

- a. Apakah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pariwisata kepulauan banyak telah memperhatikan akuntabilitas lingkungan yang ada?

Jawab: Ya, sangat diperhatikan.

- b. Apakah bisa dipastikan dalam kebijakan, program dan strategi pembangunannya dari sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan?

Jawab: Tidak tau.

- c. Bagaimana proses kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak dilakukan?

Jawab: Sejauh ini saya tidak mengetahui secara pasti dan jelas.

8. Adanya Pelatihan Masyarakat Terkait

- a. Apakah dalam pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak secara berlanjut telah melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat

dan meningkatkan kemampuan bisnis secara *vocational* dan *professional*?

Jawab: Ya, itu hampir setiap tahun diadakan oleh pemerintah.

- b. Apa saja bentuk dari topik-topik pelatihan yang diarahkan dalam pembangunan kepariwisataan yang berlanjut?

Jawab: Seperti *tour guide*, penginapan, akomodasi dan lain-lain.

- c. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat terkait?

Jawab: Kami sangat antusias dengan adanya pelatihan ini karena kami ingin membekali pengetahuan terhadap aktivitas apa saja yang bisa kami layani dengan maksimal. Untuk faktor penghambat adalah tidak ada kelanjutan dari pelatihan ini, jadi kami menilai hanya sebatas formalitas.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul : Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil

e. *Tour Guide*

Nama : Sadriansya Berutu S. IP

Umur : 26 Tahun

1. Adanya Partisipasi Masyarakat Terkait

- a. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak?

Jawab: Tidak sepenuhnya.

- b. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan serta mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata kepulauan banyak?

Jawab: Yang saya ketahui untuk visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan di kepulauan banyak secara khusus belum ada. Tapi untuk visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Singkil itu ada di RIPPDA. Apakah RIPPDA ini sudah disosialisasikan, atau di publikasikan, saya rasa belum. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui kalau tidak adanya informasi yang jelas

terkait program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan, bagaimana bentuk visi, misinya dan lain-lain.

Jawab: Belum sepenuhnya.

2. Adanya Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

- a. Apakah ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Ada, tapi belum sepenuhnya.

- b. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Yang saya ketahui hanya Pemerintah Daerah, POKDARWIS, GENPI.

- c. Apakah keterlibatan pemangku kepentingan terlibat aktif dan produktif dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Sudah terlihat aktif, tetapi belum terlihat produktifitasnya.

3. Adanya Kemitraan Kepemilikan Lokal

- a. Apakah pembangunan pariwisata kepulauan banyak mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas kepada masyarakat setempat?

Jawab: Ya.

- b. Apakah usaha fasilitas penunjang pariwisata kepulauan banyak sudah dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat melalui model kemitraan yang sinergis?

Jawab: Ya, itu sudah dilaksanakan dari beberapa tahun yang lalu.

- c. Bagaimana keterkaitan antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat setempat dalam menunjang kepemilikan lokal dari berbagai usaha pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Sangat berkaitan, hal ini dapat kita lihat bentuk kerjasama antara *tour guide* dengan pelaku usaha transportasi, penginapan, rumah makan yang saling bergantung satu sama lain.

4. Adanya Pemanfaatan Sumber Daya Berlanjut

- a. Apakah pembangunan kepariwisataan menggunakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan?

Jawab: Ya.

- b. Apa langkah pemerintah dalam membangun pariwisata kepulauan banyak dengan memanfaatkan sumber secara berlanjut?

Jawab: Selain mengatur penggunaan bahan material yang bisa merusak dan tidak ramah terhadap lingkungan pemerintah juga selalu mengajak para *Tour Guide* untuk dapat memberikan pemahaman kepada para wisatawan untuk tetap menjaga lingkungan demi keberlanjutan aktifitas pariwisata.

- c. Apakah pemerintah menjamin bahwa sumber daya dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku?

Jawab: Ya.

5. Adanya Mengakomodasikan Masyarakat

- a. Apakah aspirasi dan tujuan masyarakat setempat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan?

Jawab: Ya.

- b. Bagaimana keharmonisan antara pengunjung, pelaku usaha dan masyarakat setempat dalam kegiatan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Sangat harmonis, tentunya mereka saling berinteraksi dan selalu mengingatkan tentang norma-norma yang ada agar tidak terjadinya aktivitas pariwisata yang melanggar norma-norma daerah setempat.

- c. Apakah perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran sudah mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam pengembangan atraksi wisata?

Jawab: Ya, dengan adanya Festival Pulau Banyak Internasional beberapa tahun yang lalu.

6. Adanya Daya Dukung Lingkungan

- a. Apa pertimbangan utama daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan?

Jawab: Sosial, ekonomi dan budaya.

- b. Apakah pembangunan dan pengembangan sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada?

Jawab: Tidak sepenuhnya serasi dan sesuai, mengingat adanya tempat yang dijadikan kawasan privasi yang menjadikan wisatawan tertentu saja yang bisa mengunjunginya.

- c. Apa skala dan tipe fasilitas wisata yang diupayakan supaya tidak melampaui batas ambang penggunaan yang dapat ditoleransi?

Jawab: Wisata Halal yang ditetapkan dalam RIPPDA Provinsi Aceh seharusnya dijadikan pedoman dalam pengembangan dan pembangunan fasilitas dan aktifitas pariwisata agar sesuai dan serasi dengan batas kapasitas lokal.

7. Adanya Akuntabilitas Lingkungan

- a. Apakah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pariwisata kepulauan banyak telah memperhatikan akuntabilitas lingkungan yang ada?

Jawab: Ya, sangat diperhatikan, saya selaku *tour guide* selalu mengingatkan kepada wisatawan yang saya bawa untuk tidak membuang sampah sembarangan demi menjaga lingkungan, disamping itu saya juga mengingatkan kepada wisatawan kalau sedang *snorkeling* agar tidak menginjak terumbu karang yang ada demi menjaga lingkungan dan ekosistem laut.

- b. Apakah bisa dipastikan dalam kebijakan, program dan strategi pembangunannya dari sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan?

Jawab: Kita berharap seperti itu.

- c. Bagaimana proses kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak dilakukan?

Jawab: Harapan kita supaya dalam kebijakan, program dan strateginya terus berupaya dalam mensejahterkan masyarakat setempat.

8. Adanya Pelatihan Masyarakat Terkait

- a. Apakah dalam pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak secara berlanjut telah melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara *vocational* dan *professional*?

Jawab: Ya, setiap tahun dilaksanakan.

- b. Apa saja bentuk dari topik-topik pelatihan yang diarahkan dalam pembangunan kepariwisataan yang berlanjut?

Jawab: Seperti pelatihan *tour guide*, layanan penginapan, transportasi dan lain-lain.

- c. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat terkait?

Jawab: Tidak adanya kelanjutan dari pelatihan tersebut, jadi dinilai sebagai bentuk formalitas saja.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul : Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil

f. Tokoh Masyarakat

Nama : Sudirman

Umur : 50 Tahun

1. Adanya Partisipasi Masyarakat Terkait

- a. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak?

Jawab: Sejauh ini, pemerintah kabupaten aceh singkil selalu memberikan ruang untuk terus mengontrol dan mengawasi pembangunan pariwisata di kepulauan banyak.

- b. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan serta mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata kepulauan banyak?

Jawab: Kita masih tahapan sosialisasi dan koordinasi dalam menentukannya. Karena visi, misi dan tujuan pembangunan

kepariwisataan di kepulauan banyak secara permanen belum ada atau mungkin kalaupun ada informasinya belum di publikasikan.

- c. Apakah masyarakat juga diberikan ruang dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya?

Jawab: Jelas, kenapa tidak diberikan ruang untuk mengimplementasikan program tersebut, karena seluruh pembangunan itu kita upayakan tetap berkaitan untuk masyarakat khususnya.

2. Adanya Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

- a. Apakah ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Jelas ada.

- b. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Sejauh ini yang bisa kita pastikan adalah pemerintah daerah, kelompok sadar wisata. Kalau untuk asosiasi bisnis dan industri pariwisata itu sendiri belum ada terlihat.

- c. Apakah keterlibatan pemangku kepentingan terlibat aktif dan produktif dalam pembangunan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Belum sepenuhnya aktif dan produktif.

3. Adanya Kemitraan Kepemilikan Lokal

- a. Apakah pembangunan pariwisata kepulauan banyak mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas kepada masyarakat setempat?

Jawab: Belum.

- b. Apakah usaha fasilitas penunjang pariwisata kepulauan banyak sudah dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat melalui model kemitraan yang sinergis?

Jawab: Sudah

- c. Bagaimana keterkaitan antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat setempat dalam menunjang kepemilikan lokal dari berbagai usaha pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Pada prinsipnya kerjasama antara pelaku usaha lokal sendiri dengan masyarakat setempat. Tetapi untuk pelaku usaha yang dari luar itu sendiri kita tidak bisa menjamin keterkaitan mereka dengan masyarakat setempat karena kurangnya koordinasi dan kerjasama.

4. Adanya Pemanfaatan Sumber Daya Berlanjut

- a. Apakah pembangunan kepariwisataan menggunakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan?

Jawab: Kalau untuk beberapa kawasan di kecamatan pulau banyak sendiri itu ada. Tetapi menurut saya itu terjadi di kecamatan di pulau banyak barat tepatnya di desa asantola yang keasliannya sudah rusak akibat penggunaan material dan alat-alat yang merusak lingkungan sekitar destinasi tersebut. Seperti contohnya bahwa kita lihat yang dulunya air yang berada di kawasan itu jernih, dingin sekarang sudah keruh dan tidak sedingin dulu.

- b. Apa langkah pemerintah dalam membangun pariwisata kepulauan banyak dengan memanfaatkan sumber daya secara berlanjutan?

Jawab: Sejauh yang saya ketahui pemerintah mengatur material-material yang tidak ramah lingkungan dalam hal pengembangan kepariwisataan. Tetapi disini pemerintah menurut saya kurang pengawasan.

- c. Apakah pemerintah menjamin bahwa sumber daya dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku?

Jawab: Tidak tau.

5. Adanya Mengakomodasikan Masyarakat

- a. Apakah aspirasi dan tujuan masyarakat setempat diakomodasikan dalam program kegiatan kepariwisataan?

Jawab: Seluruh aspirasi dari masyarakat sudah diakomodasikan oleh pemerintah daerah. Hanya saja belum sepenuhnya terealisasikan.

- b. Bagaimana keharmonisan antara pengunjung, pelaku usaha dan masyarakat setempat dalam kegiatan pariwisata kepulauan banyak?

Jawab: Sangat terlihat harmonis.

- c. Apakah perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran sudah mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam pengembangan atraksi wisata?

Jawab: Belum sepenuhnya.

6. Adanya Daya Dukung Lingkungan

- a. Apa pertimbangan utama daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan?

Jawab: Saya rasa seperti pertimbangan daya dukung fisik, sosial, ekonomi dan budaya.

- b. Apakah pembangunan dan pengembangan sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada?

Jawab: Untuk sementara masih sesuai dan serasi. Tetapi kami dari masyarakat setempat tetap menyampaikan kepada pemilik usaha penginapan dan *tour guide* agar tetap mengikuti aturan dan tetap menjalankan syariat islam bagi yang muslim.

- c. Apa skala dan tipe fasilitas wisata yang diupayakan supaya tidak melampaui batas ambang penggunaan yang dapat ditoleransi?

Jawab: Wisata Halal

7. Adanya Akuntabilitas Lingkungan

- a. Apakah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pariwisata kepulauan banyak telah memperhatikan akuntabilitas lingkungan yang ada?

Jawab: Ya, tetapi belum sepenuhnya karena permasalahan sampah masih menjadi permasalahan utama dalam lingkungan.

- b. Apakah bisa dipastikan dalam kebijakan, program dan strategi pembangunannya dari sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan?

Jawab: Ya, kita selalu mengusahakan itu.

- c. Bagaimana proses kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak dilakukan?

Jawab: Sejauh yang kita ikuti seperti didalam musrenbang kita selalu berupaya agar dalam kebijakan, program dan strategi pembangunannya selalu berdampak positif untuk masyarakat setempat.

8. Adanya Pelatihan Masyarakat Terkait

- a. Apakah dalam pembangunan kepariwisataan kepulauan banyak secara berlanjut telah melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara *vocational* dan *professional*?

Jawab: Ya, setiap tahun kita dapat informasi tentang pelaksanaan pelatihan yang akan dilaksanakan pemerintah.

- b. Apa saja bentuk dari topik-topik pelatihan yang diarahkan dalam pembangunan kepariwisataan yang berlanjut?

Jawab: Seperti pelatihan *tour guide*, Layanan transportasi, penginapan dan lain-lain.

- c. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan terhadap masyarakat terkait?

Jawab: Masyarakat sangat senang dan mengikuti pelatihan guna membekali mereka agar supaya bisa semaksimal mungkin untuk menjadi tuan rumah dalam pelayanan aktifitas pariwisata.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 18 - Maret 2021

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : EKO FIRDAUS
 N P M : 16.03.1000.78
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 142,0 sks, IP Kumulatif ..3,03

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil	1
2	Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil	
3	Kolaborasi Antar Sektor Dalam Pengembangan Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal,*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl. 18 - Maret 2021


 (... Eko FIRDAUS ...)

Ketua,

 (Nait Khalid, S.IP., M.Ed.)



*) dilampirkan setelah judul ditandatangan oleh Ketua Jurusan.

065



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 384/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **18 Maret 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **EKO FIRDAUS**
 N P M : 1603100078
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **TATA KELOLA PARIWISATA KEPULAUAN BANYAK
 KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Pembimbing : **Dr. SITI HAJAR., S.Sos., M.SP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 066.16.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 18 Maret 2022.



Ditetapkan di Medan,
 Medan, 04 Syaban 1442 H
 18 Maret 2021 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, ^{03/04}.....2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Eko FIRDAUS
 N P M : 1603100078
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018.. tanggal 15 Rabiul Awwal 1440H / 23 November 2018 dengan judul sebagai berikut :

TATA KELOLA PARIWISATA KEPULAUAN BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
 Pembimbing

(Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SB)

Pemohon,

(EKO FIRDAUS)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 509/UND/II.3-AU/UMSU-03/FF/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 10 April 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : **Nalili Khairiah, S.IP., M.Pd.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
11	DERI SYAHPUTRA	1703100085	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWENANGAN GUGUS TUGAS DI KOTA MEDAN
12	EKO FIRDAUS	1603100078	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI.	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	TATA KELOLA PARIWISATA KEPULAUAN BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL
13	MILA FITRI UTAMI	1703100024	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA PELAWI SELATAN KECAMATAN BABALAN PANGKALAN BERANDAN
14					
15					

Medan, 26 Syaban 1442 H

08 April 2021 M



Dr. Nalili Khairiah, S.Sos.,MSP.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **EKO FIRDAUS**
N P M : **1603 10078**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Publik**
Judul Skripsi : **Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	25/3/2021	Bimbingan proposal Bab I sampai Bab III	
2.	27/3/2021	Perbaikan latar belakang masalah	
3.	9/4/2021	Acc seminar proposal	
4.	5/4/2021	Bimbingan Draft wawancara	
5.	8/4/2021	Acc Draft wawancara	
6.	6/5/2021	Bimbingan Pembahasan	
7.	5/2/2021	Bimbingan bab IV sampai Bab V	
8.	08/08/2021	Acc Skripsi	

Medan, 08. agustus 20. 21.

Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

Dr. Arisn Saleh, S.Sos, M.S.P

ANANDA MOHARDIKA M. S.S., M.P.

SITI HANAN, S.Sos. M.S.P



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 534/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021
 Lampiran : --
 Hal : **Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa**

Medan, 10 Ramadhan 1442 H
 22 April 2021 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA)**
Kabupaten Aceh Singkil
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **EKO FIRDAUS**
 N P M : 1603100078
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : X (Sepuluh) / Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **TATA KELOLA PARIWISATA KEPULAUAN BANYAK
 KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
 Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Singkil - Pulo Km 12,5 Singkil Utara Kode Pos 24725

Email : disparpora.acehsingkil@gmail.com Blogspot : <http://disparporasingkil.blogspot.com>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 581/27/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EDY HARTONO, BA**
 Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Olahraga
 Kabupaten Aceh Singkil

Dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama : **EKO FIRDAUS**
 Tempat/Tgl, Lahir : Singkil, 27 Juni 1996
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Desa Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil
 Nama Kampus : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Alamat Kampus : Jl. Kapten Muchtar Basri No 3, Glugur Darat II,
 Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatra Utara

Benar Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupten Aceh Singkil dengan judul "Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil"

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Singkil, 07 Oktober 2021

EDY HARTONO, BA
 Pembina Utama Muda (IV c)
 NIP. 19680418 199009 1 001

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

SK-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1185/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jumat, 15 Oktober 2021
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJUI I	PENGUJUI II	PENGUJUI III	
1	EKO FIRDAUS	1603100078	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI, M.SP.	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP.	TATA KELOLA PARIWISATA KEPULAUAN BANYAK KEBUPATEN ACEH SINGKIL
2						
3						
4						
5						

Notulis Sidang :

1.



Prof. Dr. MUBAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Penitia Ujian



Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom

Medan, 06 Rabiul Awwal 1443 H
13 Oktober 2021 M

Sekretaris